

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
PARIWISATA DI KOTA BATU**

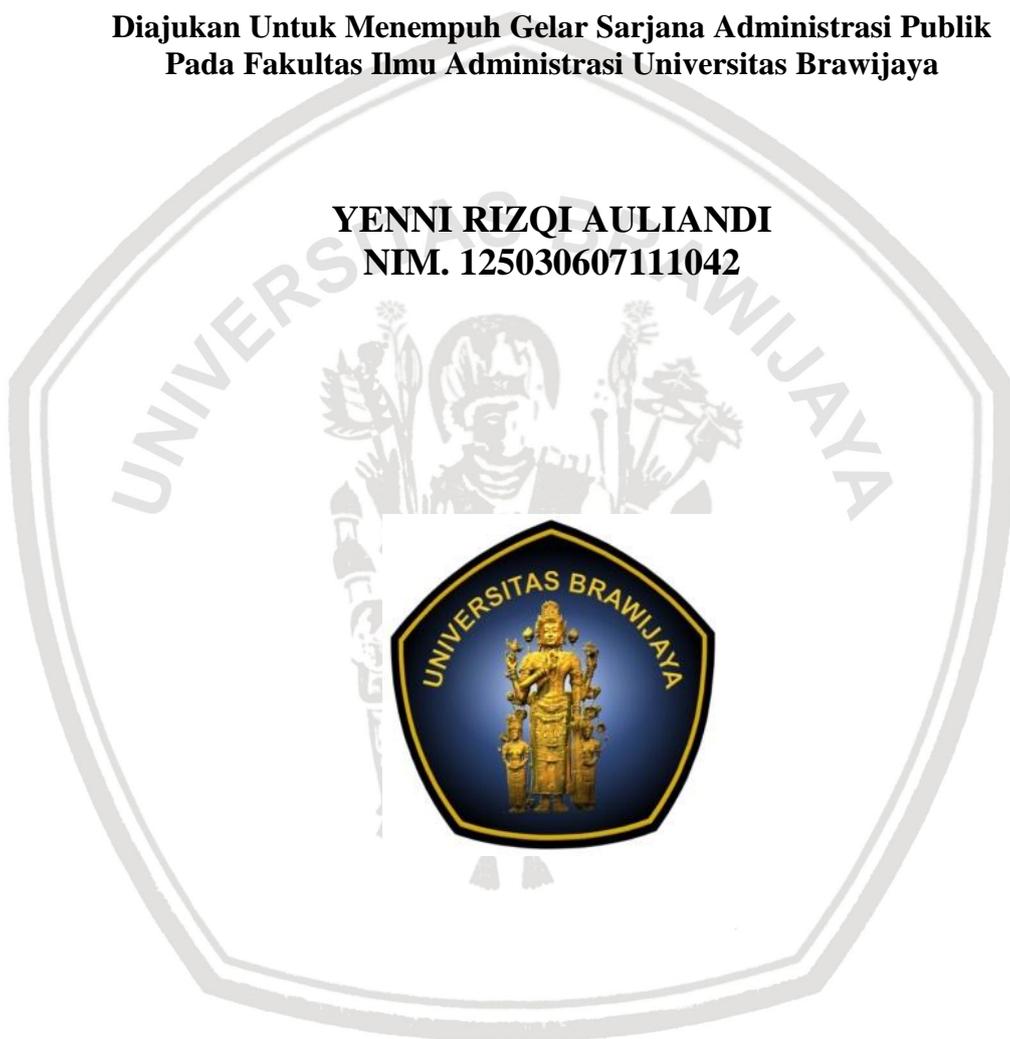
(Studi Pada Wisata *Handcraft* di Desa Junrejo)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**YENNI RIZQI AULIANDI**

**NIM. 125030607111042**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

“ You don’t need anybody to tell you who you are or what you are.

You are that you are ! ”

**- John Lennon -**

“ Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya,  
tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar.

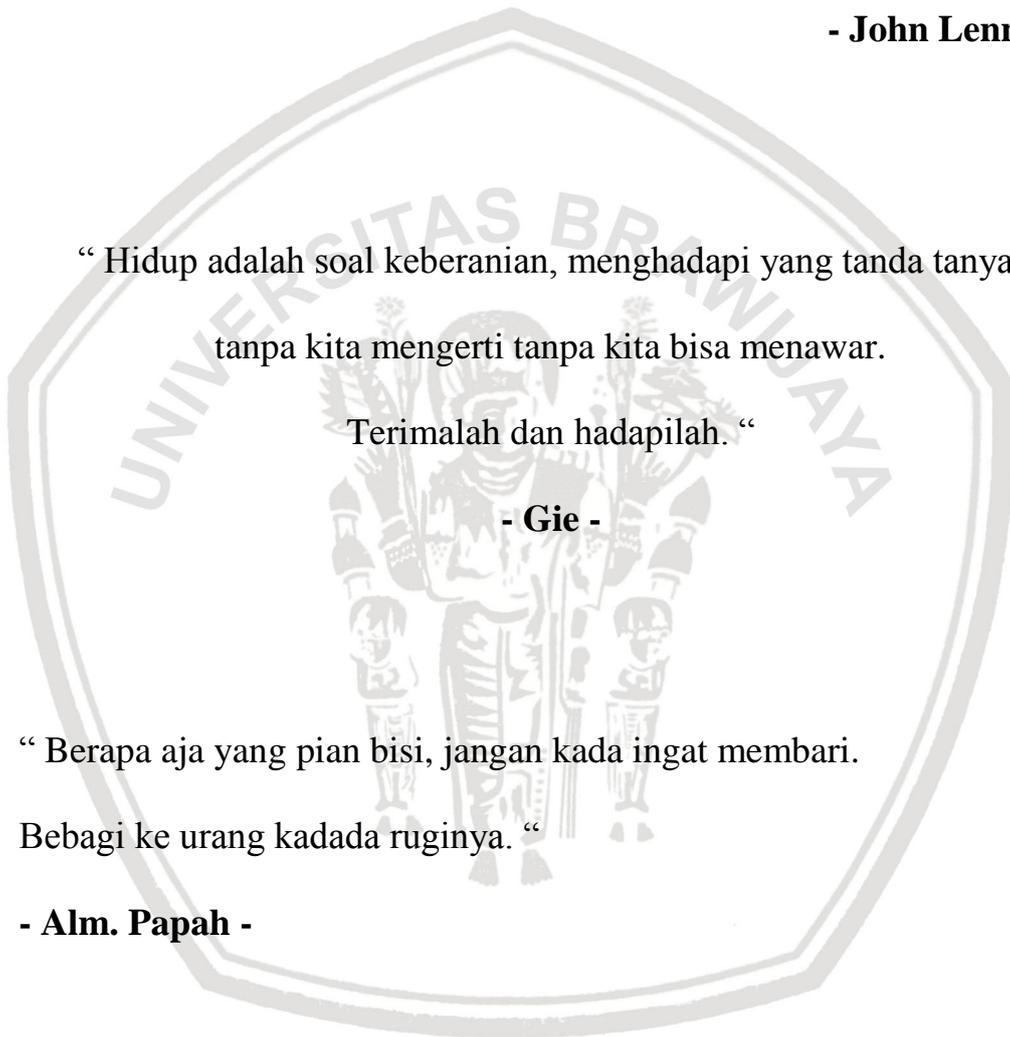
Terimalah dan hadapilah. “

**- Gie -**

“ Berapa aja yang pian bisi, jangan kada ingat membari.

Bebagi ke urang kadada ruginya. “

**- Alm. Papah -**



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya Yenni Rizqi Auliandi sangat bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh pihak atas doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KOTA BATU (Studi Pada Wisata *Handcraft* di Desa Junrejo)**. Saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga, saudara, sahabat, serta teman-teman yang selalu mendukung saya hingga menyelesaikan pendidikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm. H. Akhmad Halidi dan Hj. Yulianti selaku orangtua penulis yang telah memberikan seluruh kebutuhan bagi peneliti, baik moril maupun materi. Terima kasih atas segala fasilitas, biaya, motivasi, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
2. Wenni Rizqi Auliandi, Yuliandi Rizqi Trijaya, dan Riandi Rizqi Arkan Atmajaya selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Kota Malang.
3. Dhefi, fitya, angel, suci, selaku sahabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
4. Cindy, Eby, ramzy, gading, oyin, faisal, ateng, rya, mutya, martina yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.

5. Ervin Nugraha, Suciana Dian, Faiz Rizqi, Muchsin, Nita, Agustin, Bayu Anarga, Andi serta teman-teman Administrasi Publik lainnya, khususnya Perencanaan Pembangunan yang telah membantu dan memberikan dukungan selama kuliah dan penulisan skripsi.
6. Siska Amalia, Dita, Dinda, selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan motivasi dan waktu selama di Malang.
7. Dwiki Sri selaku sahabat sekaligus sebagai teman diskusi yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, dukungan, dan doa selama ini.
8. Syafita, Devi, Tenri, Lala selaku teman-teman kontrakan yang telah memberikan dukungan, doa, serta rasa kekeluargaan selama satu atap.
9. Mojo dan anak-anak munyes yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa, serta membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi.
10. Erlandi, Lutfi, Rio, Gendon, Rendika, Saka, Boy, Tori selaku teman-teman diskusi dari fakultas lain yang telah memberikan dukungan.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di  
Kota Batu (Studi Pada Wisata *Handcraft* di Desa Junrejo)

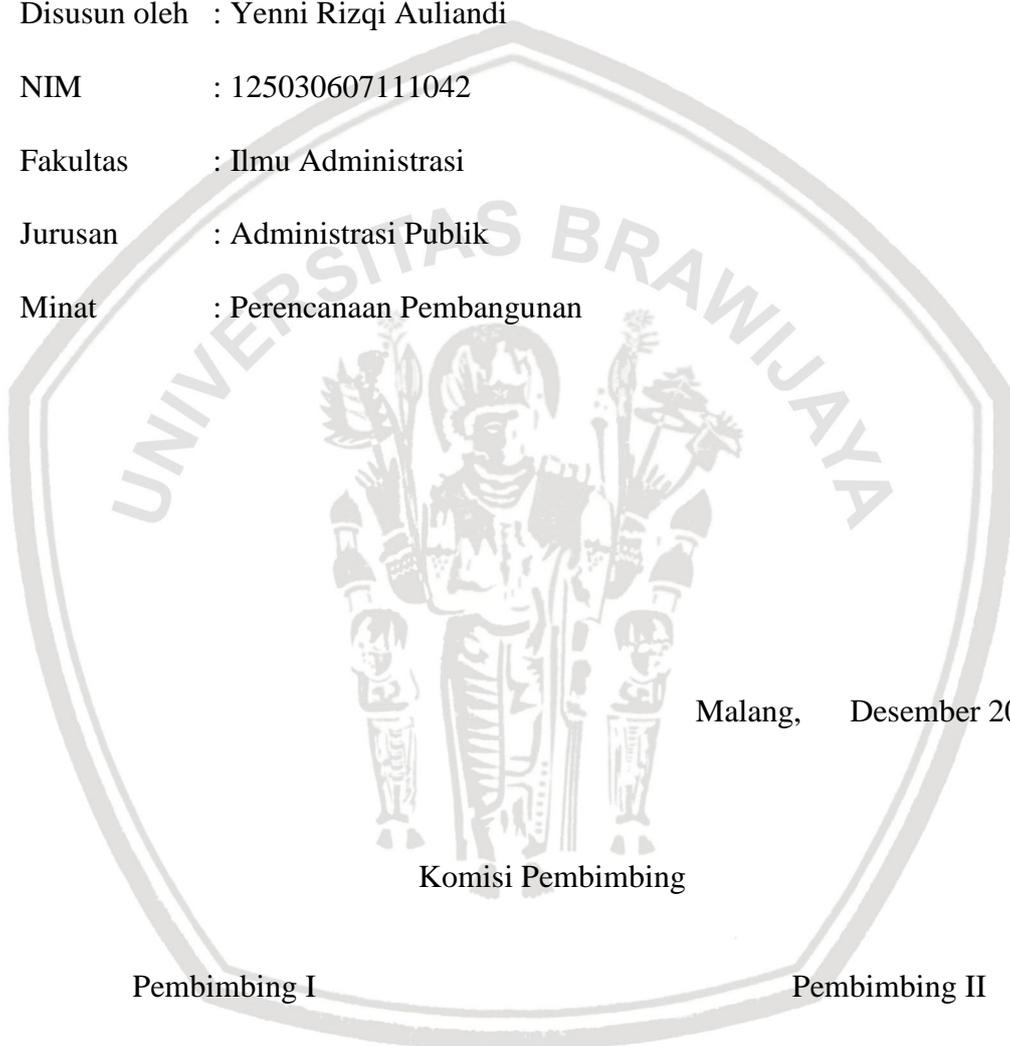
Disusun oleh : Yenni Rizqi Auliandi

NIM : 125030607111042

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan



Malang, Desember 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si  
NIP. 1971050519999032001

Sujarwoto, M.Si, Ph.D  
NIP. 197501302003121002

**TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI**

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Desember 2018

Jam : 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Yenni Rizqi Auliandi

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di  
Kota Batu (Studi Pada Wisata *Handcraft* di Desa Junrejo)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Anggota I

Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si  
NIP. 1971050519999032001

Sujarwoto, M.Si, Ph.D  
NIP. 197501302003121002

Anggota II

Anggota III

Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si  
NIP. 197307132006041001

Drs. Sukanto, MS  
NIP. 195912271986011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Desember 2018

Mahasiswa

Yenni Rizqi Auliandi

NIM. 125030607111042

## RINGKASAN

Yenni Rizqi Auliandi, 2018, **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Kota Batu** (Studi Pada Wisata *Handcraft* di Desa Junrejo), Dosen Pembimbing I: Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II: Sujarwoto, M.Si., Ph.D., 121 Halaman + xvi.

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu, khususnya pada wisata *handcraft* di Desa Junrejo. Pemerintah daerah sebagai lembaga penyelenggara di daerah memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus melakukan pembangunan untuk menunjang kegiatan dan fasilitas pariwisata. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pembangunan pariwisata di Desa Junrejo karena masyarakat memiliki kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk dan tahap teori partisipasi masyarakat oleh Ericson dan analisis tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu berupa studi literatur dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Batu, khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo, yaitu tahap perencanaan berupa rapat pertemuan, musyawarah, survei lapangan, dan studi banding. Tahap pelaksanaan berupa kegiatan produksi, koordinasi, dan pelatihan *guide*. Tahap pemanfaatan berupa kegiatan mural, manajemen pemasaran, dan pembuatan situs atau *web*. Faktor pendukung berupa kemauan dan keterampilan masyarakat, pelatihan, dan budaya. Faktor penghambat berupa ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, rendahnya tingkat pendidikan, dan tidak adanya lahan yang luas untuk parkir kendaraan besar. Analisis tangga partisipasi dalam tahap perencanaan yaitu Konsultasi dan Penentruman dalam kategori Derajat Tanda Partisipasi. Tangga partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu Kendali Warga dan Pendelegasian Kekuasaan dalam kategori Derajat Kuasa Masyarakat. Tangga partisipasi dalam tahap pemanfaatan yaitu Kendali Warga dan Kemitraan dalam kategori Derajat Kuasa Masyarakat serta Informasi dalam kategori Derajat Tanda Partisipasi.

**Kata Kunci :** Partisipasi masyarakat, Pembangunan pariwisata, *Handcraft*.

## SUMMARY

Yenni Rizqi Auliandi, 2018, **People Participation in Tourism Development of Batu city** (Study in Handcraft Tourist Destination in Junrejo village), Supervisor I: Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si., Supervisor II: Sujarwoto, M.Si., Ph.D, 121 Pages + xvi.

This study discuss about people participation in tourism development of Batu city, particularly in handcraft tourist destination in Junrejo village. Regional government as the official authority in regional area has its task and function to improve people's welfare with ongoing development to support the activities and facilities of tourism. In this development, government would cooperate with private parties and the surrounding communities. People participation is one of the important factors in tourism development in Junrejo village because communities have its vital contribution in planning, implementation and its utilization.

Theory used in this study is the form and stages people participation theory by Ericson and analysis of ladder people participation by Arnstein. Method used in this study is descriptive qualitative method with case study approach. Data used in this study was based on primary and secondary data sources, which are literature review and documentation. Data collection techniques used in this study was indepth interview, observation, and documentation, also analysis using data condensation, data display, and conclusion.

Result of this study showed that the form and stages of people participation in development of Batu city, particularly for handcraft tourist destination in Junrejo village, were planning stage such as meeting, discussion, field survey, and comparison study. Implementation stage would be production, coordination, and guide training activities. Utilization stage would concern with mural activities, marketing management, and sites or web page making. The support factors were people's willingness and skill, training, and culture. While the impeding factors were people dependency toward government, low education level, and limited land for large vehicle parking sites. Analysis of ladder people's participation in the planning stage was Consultation and Placation in the category of Degree of Tokenism. In implementation stage was Citizen Control and Delegated Power in the category of Degree of Citizen Power. Participation ladder in utilization stage was Citizen Control and Partnership in the category of Degree of Citizen Power and Information in the category of Degree of Tokenism.

**Keywords:** People participation, Tourism development, Handcraft.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KOTA BATU (Studi Pada Wisata Handcraft di Desa Junrejo)**.

Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA. Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Endah Setyowati, S.Sos. M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan memberikan kritik serta saran kepada penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi.
4. Dr. Sujarwoto, M.Si. Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan motivasi, kritik, solusi, dan membantu penulis dalam memecahkan permasalahan dalam menyelesaikan skripsi.

5. Ibu Elliani Pristiningsih, S.Pd. selaku Seksi Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata dan juga sebagai informan penulis yang membantu memberikan informasi dalam penelitian.
6. Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kantor Kepala Desa Junrejo dan juga sebagai informan penulis yang telah memberikan informasi dan mengarahkan penulis dalam penelitian.
7. Bapak Tohu selaku informan utama penulis yang juga menjadi Ketua UMKM dan anggota Pokdarwis Desa Junrejo yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian, serta memberikan inspirasi kepada penulis tentang kerajinan tangan dan wirausaha.
8. Serta seluruh pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, oleh sebab itu penulis sangat terbuka adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, civitas akademika, pihak dan instansi / lembaga terkait, serta seluruh pembaca pada umumnya.

Malang, Desember 2018

Yenni Rizqi Auliandi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Perencanaan Pembangunan .....	11
1. Perencanaan .....	12
2. Pembangunan .....	13
3. Arti Penting Perencanaan dalam Pembangunan .....	14
4. Proses Perencanaan Pembangunan .....	15
B. Teori Partisipasi Masyarakat .....	19
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	19
2. Bentuk dan Tahap Partisipasi Masyarakat .....	21
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan .....	30
C. Desa Wisata .....	32
D. Penelitian Terdahulu.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian .....	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Metode Analisis.....	48

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum .....	50
1. Gambaran Umum Kota Batu .....	50
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	57
3. Gambaran Umum Desa Junrejo .....	63
B. Tahap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Desa Junrejo Kota Batu.....	69
1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan .....	70
2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan.....	75
3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pemanfaatan.....	82
C. Analisis Tangga Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pemanfaatan .....	88
1. Tangga Partisipasi dalam Tahap Perencanaan .....	90
2. Tangga Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan .....	92
3. Tangga Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan.....	93
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu .....	96
1. Faktor Pendukung .....	96
2. Faktor Penghambat .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Tangga Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan,  
dan Pemanfaatan..... 95



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Peta Kota Batu .....	51
Gambar 4.2	Logo Kota Batu.....	52
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu .....	54
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu .....	59
Gambar 4.5	Peta Desa Junrejo.....	63
Gambar 4.6	Struktur Organisasi Desa Junrejo .....	66
Gambar 4.7	Pabrik Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	76
Gambar 4.8	Struktur Organisasi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	77
Gambar 4.9	Kegiatan Produksi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	78
Gambar 4.10	Kegiatan Produksi Tempat Tisu Olahan Kayu.....	79
Gambar 4.11	Kegiatan Pembuatan Cobek Olahan Batu Alam .....	79
Gambar 4.12	Produksi Cobek dan Ulekan .....	80
Gambar 4.13	Hasil Produksi Kerajinan Kayu.....	85
Gambar 4.14	Hasil Produksi Kerajinan Cobek .....	86
Gambar 4.15	Hasil Produksi Kerajinan Anyaman dan Lampion.....	86
Gambar 4.16	Tangga Partisipasi .....	90



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian .....	110
Lampiran 2. Surat Disposisi Dinas Pariwisata.....	111
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Desa Junrejo .....	112
Lampiran 4. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu.....	113
Lampiran 5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu.....	114
Lampiran 6. Wawancara dengan Ibu Hasanatul Mardiyah, SH, MM. Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Batu .....	115
Lampiran 7. Wawancara dengan Ibu Eliani Pristiningsih, S.Pd. Seksi Peran Serta Masyarakat, Dinas Pariwisata Kota Batu .....	115
Lampiran 8. Wawancara dengan Bapak Mulyono Asih, Kepala Seksi Pelayanan Desa Junrejo Kota Batu .....	116
Lampiran 9. Kantor Pelayanan dan Kepala Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu .....	116
Lampiran 10. Wawancara dengan Bapak Tohu, Ketua UMKM Desa Junrejo dan Pemilik Pabrik Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	117
Lampiran 11. Pabrik Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	117
Lampiran 12. Struktur Organisasi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	118
Lampiran 13. Kegiatan Produksi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya” .....	118
Lampiran 14. Kegiatan Produksi Tempat Tisu Olahan Kayu .....	119
Lampiran 15. Kegiatan Produksi Cobek dan Ulekan Olahan Batu Alam.....	119
Lampiran 16. Produksi Cobek dan Ulekan .....	120
Lampiran 17. Hasil Produksi Kerajinan Kayu .....	120
Lampiran 18. Hasil Produksi Kerajinan Cobek dan Ulekan .....	121
Lampiran 19. Hasil Produksi Kerajinan Anyaman dan Lampion .....	121

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan merupakan suatu proses dan dilakukan secara sadar oleh pihak yang berkepentingan secara berkelanjutan serta bersifat tiada akhir. Pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, dari tidak ada menjadi ada, dari kurang menjadi cukup, dan dari lama menjadi baru. Siagian (2012) menambahkan:

“seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”.

Berdasarkan definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan bagian dari upaya nasional, yang artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi seluruh rangkaian yang hidup didalamnya, yang dimaksudkan adalah pihak pemangku kepentingan lain seperti swasta dan elemen masyarakat itu sendiri, dengan adanya dukungan dari semua *stakeholder* tersebut maka akan lebih mudah dalam pencapaian tujuan dan hasil dari pembangunan nasional.

Upaya pewujudan pembangunan nasional dilakukan bukan semata-mata dilakukan oleh pusat, akan tetapi juga didukung oleh daerah, seperti yang tertuang pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 pasal 259 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian dan daerah.

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya sendiri yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti tujuan dari otonomi daerah tersebut dimulai dari bagian terkecil dalam pemerintahan yaitu desa.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari uraian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, desa memiliki peran penting dalam stabilitas pembangunan nasional. Pemberian wewenang tersebut disebut juga dengan desentralisasi dimana lahir dari otonomi daerah yang dibuat sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Desentralisasi menurut Diamond dalam Solekhan (2014) memiliki esensi yang terkait dengan lima hal penting. Pertama, desentralisasi membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi dikalangan warga. Kedua, desentralisasi meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal. Ketiga, desentralisasi memberikan bermacam-macam saluran akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan sehingga akan meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi. Keempat, desentralisasi akan meningkatkan *checks and balances* terhadap kekuasaan pusat. Kelima, desentralisasi memberi peluang bagi partai politik dan fraksi oposisi di pusat untuk mendapat sejumlah dukungan politik.

Adanya desentralisasi juga memberikan manfaat sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan memungkinkan munculnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sangat diperlukan sebagai percepatan pembangunan desa dari berbagai manfaat yang telah ditawarkan.

Dalam pembangunan desa, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu mendapat dukungan dari swasta, dan yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat desa itu sendiri. Pihak masyarakat yang menjadi obyek bisa berasal dari masyarakat umum, tokoh organisasi masyarakat, pihak akademis, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat lainnya sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mampu memberikan masukan terhadap pembangunan di desa mereka.

Oleh karena itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus mengakomodir masyarakat agar rencana pembangunan yang sudah disusun dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Keterlibatan aktif ini disebut sebagai partisipasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang juga mendukung adanya program yang akan diterapkan pada desa menjadi lebih mudah tersampaikan, sehingga tujuan dari percepatan kesejahteraan masyarakat lebih mudah terwujud.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal (Adisasmita, 2006). Partisipasi adalah peran serta atau ikut serta secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi yang dimaksud dapat diartikan sebagai ikut serta dalam mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses pembangunan.

Partisipasi dapat diimplementasikan melalui keikutsertaan dalam berbagai program dan kegiatan yang diadakan di lingkungan mereka seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 21, Musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang diadakan setiap tahun guna menampung dan memusyawarahkan aspirasi dari masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan fisik ataupun nonfisik pada daerah. Adanya musrenbang menjadikan pembangunan desa menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik.

Pembangunan desa dapat dilakukan dari berbagai sektor, salah satunya pada sektor pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu komoditi yang mempunyai nilai sumbang yang cukup besar di Indonesia. Menurut Kementerian Pariwisata Tahun 2015, dampak yang diberikan komoditi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2015 sebesar Rp. 461,36 triliun, atau 4,23% dari PDB nasional, angka ini didapat dari pengeluaran wisatawan domestik maupun mancanegara, anggaran pariwisata pemerintah, dan investasi pada usaha pariwisata.

Adanya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia di bidang pariwisata, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor ini, dengan membuat kebijakan tentang perencanaan pariwisata. Adanya pengembangan sektor wisata yang lebih baik, diharapkan lebih meningkatkan daya tarik pariwisata tersebut sehingga mampu menyerap wisatawan domestik dan mancanegara serta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan pada daerah sekitar lokasi wisata.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata adalah Kota Batu. Kota Batu menjadi salah satu tujuan utama wisatawan yang berkunjung di Jawa Timur setelah Malang, dimana pada tahun 2015 Jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 3,5 juta jiwa, sedangkan Malang sebanyak 3,6 juta jiwa (malangtimes.com). Wisata di Kota Batu terdiri dari wisata buatan maupun wisata alam. Wisata buatan seperti Batu Night Spectacular (BNS), Jawa Timur Park (Jatimark), Taman Predator, Museum Angkut, dan Pasar Parkiran.

Wisata tersebut menjadikan Kota Batu menjadi dikenal sebagai obyek wisata, padahal banyak wisata alam ataupun wisata yang berbasis kemasyarakatan yang tidak kalah menariknya dibanding wisata buatan atau wisata artifisial tersebut. Banyak diantara wisata basis masyarakat yang masih belum mendapat perhatian penuh sehingga kurang dikenal oleh wisatawan. Perhatian yang diberikan untuk wisata dapat berupa pembuatan program kebijakan yang bersifat membangun wisata, dengan harapan dalam membangun wisata dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata harus memperhatikan posisi, potensi, dan peran masyarakat baik sebagai subyek atau pelaku maupun penerima manfaat pembangunan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pembangunan kepariwisataan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Pasal 28 Tentang Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2015 yang menyatakan bahwa strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi, masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan, serta menguatkan kelembagaan masyarakatan dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. Sehingga masyarakat desa yang dibantu oleh perangkat desa dan dinas terkait berusaha untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di masing-masing desa.

Desa Junrejo mempunyai destinasi wisata unggulan yaitu wisata Kerajinan Tangan (*handcraft*). *Handcraft* di Desa Junrejo tergolong sudah cukup besar, dibuktikan dengan penjualan dari berbagai macam *handcraft* pada pasar domestik maupun luar negeri. Sebelum adanya program desa wisata, kegiatan *handcraft* hanya terbatas penjualan saja, dengan adanya peraturan yang diturunkan oleh walikota Batu, Desa Junrejo dituntut untuk menggali potensi wisata di desanya. Akan tetapi Desa Junrejo tidak memiliki wisata alam, sehingga *Handcraft* diangkat menjadi wisata edukasi bagi masyarakat.

Adanya wisata edukasi *Handcraft*, masyarakat Desa Junrejo yang menjadi tuan rumah juga berkontribusi dalam keberhasilan destinasi wisata ini, kepedulian dan kesadaran wisata menjadi salah satu tujuan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dimana masyarakat menjadi subyek atau pelaku penting dalam pengembangan wisata. Masyarakat di Desa Junrejo terutama pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah *Handcraft* sebagai obyek wisata sudah sadar akan potensi wisata yang dimiliki, akan tetapi komunikasi masyarakat atau Pokdarwis masih belum terkoordinasi dengan baik, sehingga masih banyak kegiatan yang kurang bisa mendukung pembangunan obyek pariwisata edukasi *Handcraft* di Desa Junrejo.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata kerajinan tangan (*handcraft*) di Kota Batu khususnya di Desa Junrejo, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Kota Batu (Studi Pada Wisata *Handcraft* di Desa Junrejo)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan muncul dan menjawab dari rumusan permasalahan diatas, yaitu:

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu .
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu.

## D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademik dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki permasalahan terkait dan sebagai perbandingan dalam mengkaji alternatif partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gagasan, rekomendasi dan pertimbangan bagi pemerintah terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Desa Junrejo, sehingga pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki andil dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini berdasarkan buku pedoman penyusunan skripsi terbagi menjadi lima bab, yaitu:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan yang ada. Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu dapat menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut. Pada latar belakang berisikan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan dari jurnal, buku, atau karya ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan di Desa Junrejo dengan alternatif pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu. Adapun teori yang digunakan antara lain perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan desa wisata.

## BAB III. METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dan temuan penelitian selama di lapangan, yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan analisis teori dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Batu, khususnya studi pada wisata *handcraft* di Desa Junrejo.

## BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan. Kesimpulan berisikan ringkasan dari hasil dan pembahasan penelitian, selain itu juga terdapat saran atau rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perencanaan Pembangunan

Konsep-konsep perencanaan pembangunan dapat ditelusuri dari kata yang membentuknya, yaitu perencanaan dan pembangunan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan berbagai pendapat tentang perencanaan pembangunan. Menurut Lewis dalam Sjafrizal (2014), perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Jhingan dikutip oleh Sjafrizal (2014), mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu).

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah, 2005). Dalam Tjokroamidjojo (1985), menyatakan bahwa dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi penting atau tidaknya suatu tujuan pembangunan ekonomi, sasaran, maupun kegiatan usahanya.

## 1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karena itu pada hakikatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Conyer dan Hilss (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1985), perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Perencanaan adalah sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan. Lima hal pokok di dalam perencanaan:

1. Permasalahan pembangunan di suatu negara yang dikaitkan dengan sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya

2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber pemilihan alternatif yang terbaik
4. Penerjemahan dalam program atau kegiatan usaha yang kongkrit
5. Jangka waktu pencapaian tujuan

Mengenai pemilihan tujuan dan sasaran rencana maupun mengenai kebijakan dan cara mencapainya tergantung pula dari preferensi berdasar nilai sosial dan politik masyarakat tertentu. Dalam penetapan dan terutama daam cara pencapaian tujuan itu tiga unsur penting daripada perencanaan yang meminta perhatian adalah:

1. Perlunya koordinasi
2. Konsistensi antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat
3. Penetapan skala prioritas

## **2. Pembangunan**

Pembangunan menurut Siagian (2012), adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*). Menurut Rostow dalam Tjokroamidjojo (1985), pembangunan adalah transformasi dari negara terbelakang menjadi negara maju dan dapat dijelaskan melalui urutan tingkatan atau tahap. Menurut Piere, pembangunan adalah usaha yang secara sistematis direncanakan dan dilakukan untuk mengubah situasi dan kondisi masyarakat ke taraf yang lebih sempurna.

Sedangkan menurut Goulet (1995), salah satu bentuk perubahan sosial dan modernisasi adalah bentuk khusus dari pembangunan, sedangkan industrialisasi adalah salah satu segi dari pembangunan tersebut. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik atau maju melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

### 3. Arti Penting Perencanaan dalam Pembangunan

Dalam beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (*development planning*), maka pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri, dengan demikian pembahasan pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu :

- a. Perencanaan sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan
- b. Pembangunan sebagai tolok ukur dari berhasilnya-tidaknya pembangunan tersebut.

Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara pembangunan yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*) untuk mendapatkan hasil pembangunan yang terbaik pula (Tjokroamidjojo, 1985). Dengan adanya perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.

#### 4. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan seringkali terdapat kesalahpahaman seakan-akan perencanaan berarti kegiatan penyusunan rencana saja. Sedangkan perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Hal terakhir ini sering juga disebut sebagai pengendalian.

Secara lebih terperinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:

##### a. Penyusunan rencana

Penyusunan rencana ini terdiri dari unsur-unsur:

1. Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana (*review before take off*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*). Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.
2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut sebagai *forecastin*. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.

3. Penetapan tujuan rencana (*plan objective*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana.
4. Identifikasi kebijaksanaan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijaksanaan (*policy*) mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Untuk bisa lebih operasionalnya rencana-rencana kegiatan kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasar pemilihan alternatifnya yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar *opportunity costs* dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung oleh feasibility studies dan survei-survei pendahuluan. Penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan tersebut pada umumnya dilakukan penentuan sasaran-sasaran sektoral.
5. Tahap terakhir daripada penyusun rencana ini adalah tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, daripada putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

b. Penyusunan Program Rencana.

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan, serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Seringkali dipakai disini suatu program kegiatan dan pembiayaan yang kongkrit dari program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam proyek perencanaan (*project plan*) yang dituang dalam (*project form*). Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan, dan alat evaluasi rencana yang penting. Perlu disebutkan bahwa seringkali pengesahan rencana dilakukan sebagai penutup ditahap ini. Dengan demikian, rencana mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Sering kali tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu *flow-chart, operation-plan atau network plan*.

c. Pelaksanaan Rencana.

Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijakan-kebijaksanaan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

d. Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana.

Tujuan dari pengawasan adalah:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.
2. Apabila terdapat penyimpangan perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.
3. Dilakukannya tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan.

e. Evaluasi

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus-menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana, yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri.

Apabila disebutkan dalam penelahaan proses perencanaan pembangunan tahap-tahap ini, maka hal tersebut hanya menunjukkan urutan-urutannya saja, sebab di dalam kegiatan sebenarnya tahap-tahap itu beberapa diantaranya mungkin dilakukan secara bersama-sama. Misalnya saja bersamaan dengan pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya sudah dimulai penyusunan rencana masa berikutnya.

Identifikasi kebijaksanaan atau proyek pembangunan bisa dilakukan sembarang waktu, biarpun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan siklus perencanaan pembiayaannya. Hal terakhir ini karena biasanya perencanaan pembiayaan terkait dengan siklus tahun anggaran yang berlaku. Demikian pula tinjauan yang berjalan juga dilakukan secara terus-menerus atau periodik. Bahkan hal ini dapat memberi pengaruh untuk penyusunan kembali rencana sebelum jadwal waktu selesainya rencana seperti ditetapkan semula.

## B. Teori Partisipasi Masyarakat

### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kata kunci dalam setiap upaya program pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang sama artinya dengan peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana-rencana, kegiatan yang dilaksanakan, serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 (Pasal 2 ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat itu sendiri dalam penyusunan rencana pembangunan. Oleh sebab itu perlunya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain itulah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Sedangkan menurut Salusu (1998), partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan.

Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini didasari oleh motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang. Purnamasari (2008), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah.

## 2. Bentuk dan Tahap Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Dusseldorp dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2004) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap yaitu :

1. Partisipasi dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planing Stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

## 2. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan (*Implementation Stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

## 3. Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan (*Utilitazion Stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Effendi dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011), bahwa bentuk partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien pada program atau kegiatan tersebut.

Dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Raharjo dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang dilaksanakan dengan kegiatan tertentu saja bertujuan untuk tercapainya pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan sulit diatasi.
2. Partisipasi penuh (*full scale participation*), artinya partisipasi secara keseluruhan dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengajukan kesempatan untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro Santoro (1988) bahwa bentuk partisipasi meliputi :

1. Pikiran
2. Tenaga
3. Pikiran dan tenaga
4. Keahlian
5. Barang
6. Uang

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, adalah sebagai berikut :

1. Tenaga kerja, yaitu kontribusi masyarakat sebagai pekerja di dalam proses penataan lingkungan/kawasan.

2. Sebagai inisiator program, yaitu masyarakat mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat
3. Berbagi biaya, yaitu masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan penataan.
4. Berdasarkan kontrak, yaitu masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu/seluruh program kegiatan penataan.
5. Pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu melibatkan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi itu dilakukan oleh seseorang atas kesadaran orang tersebut untuk ikut melakukan kegiatan, wujud partisipasi dapat berupa menyumbang pemikiran, saran, ide-ide, tanggapan, juga memberikan penolakan, selain itu juga berupa materi, pikiran dan tenaga saat pelaksanaan program, serta uang atau *financial*.

Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal
2. Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut

3. Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan

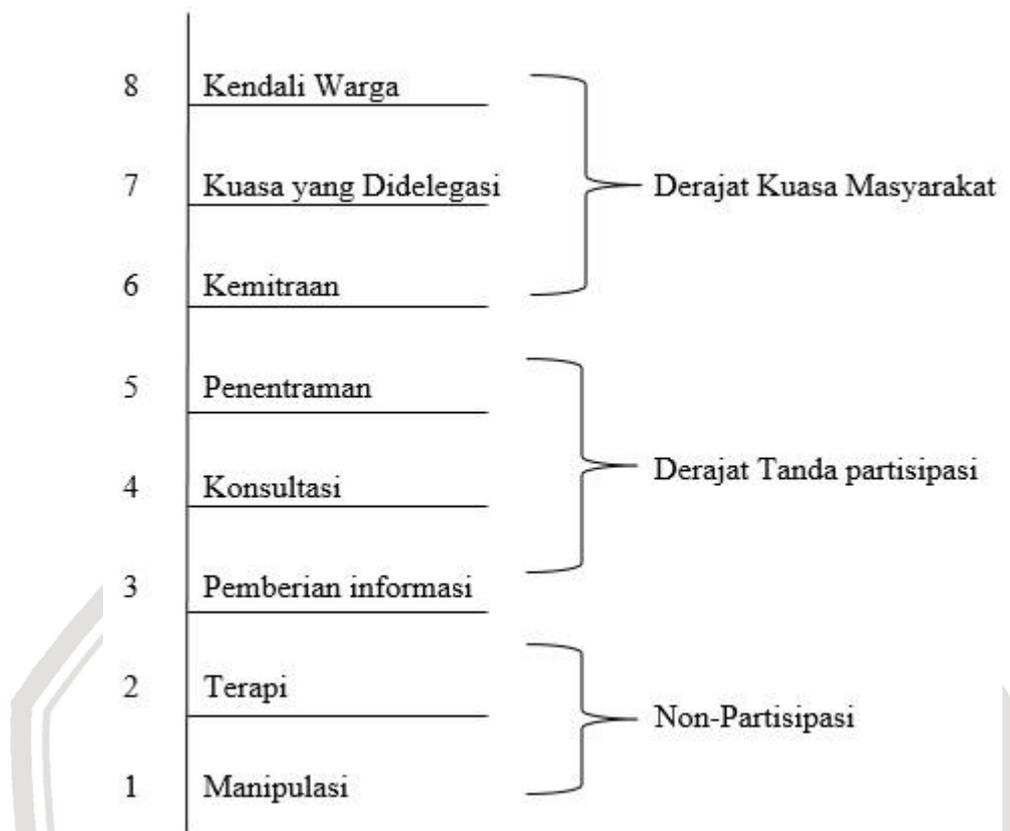
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan haruslah dilihat: a) sebagai jendela mental yaitu dengan membuka hati rakyat untuk secara sadar dan tulus terlibat dalam proses pembangunan, b) sebagai tindakan keterlibatan yang riil, aktif dan kreatif masyarakat dengan diiringi oleh potensi keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kesediaan berkorban untuk turut serta memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, dan bukanlah sebagai proses mobilisasi yang berlindung pada konsep partisipasi, tetapi merupakan suatu proses penyadaran diri dan penumbuhan keberdayaan dan keswadayaan mereka untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilihat sebagai *shared authority* diantara para *stakeholders* pembangunan, dimana proses pembangunan tidak di dominasi oleh satu pihak saja tetapi merupakan usaha bersama yang didasarkan pada nilai bersama, visi bersama dan misi bersama (Islamy, 2004). Sehubungan dengan hal itu maka bila menginginkan munculnya rasa memiliki, ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab atas berhasilnya usaha-usaha pembangunan, perlu kiranya mengubah manajemen pembangunan yang didominasi oleh paradigma *structural efficiency* menjadi manajemen yang berbasis partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan sangat mendorong terciptanya suatu hasil perencanaan yang baik, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui apa yang ada di wilayahnya.

Disamping itu, dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan, pemerintah khususnya pemerintah daerah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. Dari uraian tersebut dapat diketahui betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan tidak bisa mengabaikan partisipasi masyarakat dalam perencanaannya.

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktik partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik nol partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein (1971).

Dalam konsepnya Arnstein (1971) menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan tingkat kekuatan masyarakat dalam menentukan kegiatan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat: (1) tidak partisipatif; (2) derajat semu dan (3) kekuatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1 Tangga Partisipasi**

Sumber: Arnstein (1971)

Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (*Non-Participation*) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*) dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik masyarakat dan memperbaiki masyarakat. Dalam tangga pertama, Manipulasi bisa diartikan *relative* tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua, *Therapy* telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat, dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Pada tangga ketiga yaitu *Information* menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (*feed back*), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu *Consultation* bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjangkaran aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik.

Tangga kelima yaitu *Placation* (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisasi) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar. pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1971) terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu (*empty ritual*) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*). Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

#### **a. Faktor Pendukung**

Masyarakat membutuhkan program pembangunan daerah untuk membangun dan memperbaiki daerahnya. Pembangunan tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah, namun pihak swasta dan masyarakat juga menjadi faktor yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemauan dan semangat yang tinggi dari masyarakat menjadi faktor pendukung yang penting karena hal tersebut merupakan faktor internal yang menjadi kunci utama keberhasilan dan pemanfaatannya. Tanpa kemauan dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, apalagi di desa, sangat mungkin pembangunan tersebut terkendala. Sehingga kemauan, semangat, dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut menjadi faktor yang sangat penting.

Tingkat partisipasi masyarakat tinggi dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan pembangunan di sekitar tempat tinggal mereka. Pembangunan seperti pembangunan fisik dan sarana yang dibutuhkan masyarakat mendorong mereka untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan pendapat tentang pembangunan disekitar tempat tinggal mereka. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih bersosialisasi dengan orang lain. Mereka menyampaikan saran yang membangun dan demi kebaikan sekitarnya juga. Selain pendidikan, faktor usia produktif yang tinggi juga mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## b. Faktor Penghambat

Beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai beberapa faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat menurut Abe (2001) antara lain; a) rendahnya tingkat pendidikan, kemauan baca tulis dan keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga secara teknis sulit berpartisipasi secara produktif; b) masyarakat berada dalam situasi politik sentralistik-otoriter sehingga membudaya sikap mengekor, pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk; c) rakyat telah kehilangan institusi lokal yang bisa dipercaya dan kecerdasan lokal yang bisa dipercaya dan kecerdasan lokal sebagai akibat tekanan politik elite dan d) aspirasi yang disampaikan rakyat adalah aspirasi pantulan (refleksi) aspirasi negara.

Banyak faktor penghambat dari masyarakat kota enggan berpartisipasi, faktor penghambat yang pertama adalah susunan masyarakat yang sangat heterogen dengan kondisi sosial budaya yang sangat berbeda-beda pula. Yang kedua adalah pengalaman pahit masyarakat tentang program-program sebelumnya, sehingga masyarakat menjadi kurang percaya dan bahkan pesimis dengan program baru yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah adanya kepentingan tetap (*vested interest*) dari beberapa pihak di masyarakat. Yang keempat adalah sistem pengambilan keputusan dari atas ke bawah. Keputusan mutlak tetap ada pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah serta kelurahan. Yang kelima adalah adanya berbagai macam kesenjangan sosial serta kemiskinan turut menjadi penyebab partisipasi masyarakat terhambat.

### C. Desa Wisata

Desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalan potensi desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas, serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas penduduknya.

Desa wisata merupakan suatu bentuk lingkungan permukiman dengan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan tuntutan wisatawan didalam menikmati, mengenal, dan menghayati/mempelajari kekhasan desa dengan segala daya tariknya sesuai pula dengan tuntutan kegiatan hidup masyarakatnya (mencakup kegiatan, hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dan sebagainya), sehingga terwujudnya suatu lingkungan yang harmonis, rekreatif, terpadu dengan lingkungannya (Chafid Fandeli, 2002).

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.18/HM/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata). Selain itu desa wisata sebagai pengembangan suatu wilayah/desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema.

Desa wisata dapat diartikan sebagai tempat atau daerah yang memiliki potensi wisata yang digunakan sebagai produk, memiliki pelaku wisata, fasilitas wisata yang berupa akomodasi dan layanan lainnya sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai tempat tujuan wisata.

Pada desa wisata ada dua komponen utama, yaitu:

- a. Akomodasi, yaitu sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk
- b. Atraksi, yaitu sebuah kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berinteraksinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Sedangkan dalam Edward Inskip (2000), berpendapat bahwa: *village tourism where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and local environments* (wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam/dekat dengan suasana tradisional sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat).

Kawasan desa wisata juga memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang harus ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Menurut Inskeep dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012) komponen dasar pengembangan pariwisata didalam proses perencanaan adalah :

1. Atraksi wisata dan aktivitasnya
2. Fasilitas akomodasi
3. Fasilitas wisatawan lainnya dan jasa seperti: operasi perjalanan wisata, restoran, bank, pelayanan pos, *tourism information, retail shopping, money changer, medical care, public safety*
4. Fasilitas dan pelayanan transportasi
5. Infrastruktur lainnya meliputi persediaan air, listrik, pembuangan limbah dan telekomunikasi
6. Elemen kelembagaan yang meliputi program pemasaran, pendidikan dan pelatihan, perundang-undangan dan peraturan, kebijakan investasi sektor swasta, organisasi struktural *private* dan *public*

Strategi pembangunan desa wisata melibatkan peran serta masyarakat menurut Chafid Fandeli (2002), dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada penduduk setempat tentang apa yang akan terjadi bila pariwisata pedesaan masuk ke desa mereka
2. Menjaga dialog dengan penduduk
3. Menghargai pendapat dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan
4. Meningkatkan pemahaman akan hakikat pariwisata dan dampaknya
5. Mendorong hubungan antara wisatawan dan penduduk setempat
6. Melindungi masyarakat lokal dari melimpahnya kegiatan pariwisata

#### **D. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Analisis Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Banjaran dalam Perencanaan Prodamas di Kota Kediri)**

Penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dilakukan oleh Rendra Wahyu Septyan (2015) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Analisis Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Banjaran dalam Perencanaan Prodamas di Kota Kediri). Menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat di Kota Kediri khususnya masyarakat Kelurahan Banjaran animonya cukup tinggi dalam pelaksanaan perencanaan Prodamas. Ini ditunjukkan dalam masyarakat ambil bagian dalam pembangunan ekonomi juga pembangunan sosial selama perencanaan yang dibuat masyarakat masih dalam rencana utama Prodamas, maka pemerintah sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun sendiri lingkungan.

2) Aktor yang terlibat dalam perencanaan Prodamas ini adalah Bappeda Kota Kediri, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Masyarakat berperan sangat penting sebagai penyambung dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

3) Kesadaran masyarakat yang menginginkan perubahan di lingkungan mereka tinggi. Masyarakat mudah untuk diajak berkomunikasi dikarenakan mempunyai pendidikan yang tinggi.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini dilakukan oleh Aris Tri Cahyo Purnomo (2015), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Sekretaris BAPPEDA, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dikumpulkan dengan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa wisata: a) Survei Lapangan; b) Rencana Tapak (*site plan*); c) Anggaran dan sumber anggaran; d) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu berupa a) informasi tentang potensi dan keadaan desa; b) masukan pembuatan tempat untuk penerima tamu dan pembuatan kantor Pokdarwis; c) masukan perbaikan infrastruktur; d) saran pembuatan tempat parkir; e) saran pembuatan gazebo.

Faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung: a) faktor internal: semangat dan keinginan dari diri sendiri, Pemerintah Desa sebagai pendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan b) faktor eksternal: peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, serta. Faktor penghambat: proses sosialisasi yang belum optimal, kesibukan tiap masyarakat berbeda-beda, kesadaran masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa wisata masih relatif kurang, dan sebagian masyarakat belum begitu paham terhadap desa wisata.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga data yang disajikan secara alamiah dan apa adanya serta dapat diinterpretasikan dengan menghubungkan faktor dalam berbagai sudut pandang. Selain itu, metode kualitatif sesuai digunakan untuk meneliti masalah yang belum jelas seperti meneliti pada situasi sosial yang tidak terlalu luas sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan lebih mendalam (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk penghitungan lainnya. Penelitian dilakukan berdasarkan apa yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian harus sesuai fakta dan realita di lapangan, baik melalui pendekatan formal maupun informal. Metode kualitatif apabila diadaptasi dari John W. Creswell (2013), merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari individu maupun sekelompok orang yang menganggap dari permasalahan sosial.

Pada penelitian kualitatif menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individu serta menjelaskan kompleksitas suatu sosial. Dalam Afrizal (2014), metode kualitatif juga memiliki beberapa manfaat dalam penelitian antara lain :

1. Penggunaan metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subyektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkahlaku tersebut.
2. Metodologi kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara detail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling berpengaruh berbagai realitas sosial.
3. Metode kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor.
4. Metode kualitatif dapat menghasilkan informasi yang lebih kaya daripada metode kuantitatif. Disinilah akan berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial.

Selain manfaat menggunakan metode kualitatif juga ada beberapa keterbatasan dalam metode kualitatif tersebut. Keterbatasan tersebut karena metode kualitatif hanya melakukan kajian pendalaman terkait komunitas maupun kelompok tertentu secara spesifik, hasil penelitian tersebut tidak mengkaji komunitas maupun kelompok lain yang memiliki spesifikasi yang lain. Metode kualitatif tidak dapat dipakai untuk melakukan penelitian yang ditujukan pada generalisasi populasi yang besar.

Hasil dari metode kualitatif biasanya tidak menggambarkan besaran kejadian dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial, sehingga banyak persoalan ataupun kerugian maupun efek dalam komunitas sosial yang tidak dapat terungkap. Metode kualitatif melakukan pendekatan berupa wawancara mendalam atau observasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.

Terkait metode kualitatif juga memiliki ciri dan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, mempertimbangkan segala aspek, memahami makna serta memandang hasil penelitian sebagai spekulatif. Keuntungan dari pendekatan kualitatif yaitu seorang yang menjalankan riset akan terlibat dalam situasi sosial yang menjadi tujuan penelitiannya, serta dapat mengamati sendiri atau melihat fakta lapangan dalam kehidupan orang-orang sehingga bisa ikut serta beraktivitas bersama.

Untuk cangkupan populasi yang menjadi riset kualitatif tidak mencakup keseluruhan yang luas dengan ditetapkannya beberapa sampel. Tidak mungkin dalam suatu penelitian baik dalam menggunakan kuantitatif maupun kualitatif mencakup seluruh populasi maka dari itu perlu adanya pembatasan sampel. Dalam metode kualitatif dalam melakukan penentuan sampel dengan cara memilih informan yang bisa dijadikan informan penelitian dan memiliki kapasitas pengetahuan terkait fokus penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian deskriptif sendiri untuk menggambarkan karakteristik dari individu maupun situasi kelompok tertentu sehingga data yang didapatkan tidak berupa angka-angka melainkan kata-kata, gambar, serta catatan lapangan.

Jenis penelitian deskriptif tidak menjelaskan suatu hubungan, tidak membuat prediksi ataupun hipotesis. Pendeskripsian sesuai dengan hasil dan data yang diperoleh selama penelitian (Lexy J Moleong 2004). Penggunaan penelitian deskriptif ditujukan untuk lebih menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan perencanaan strategis dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu. Penelitian deskriptif sendiri lebih mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian ataupun kutipan-kutipan.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan tahapan awal dalam perencanaan penelitian. Fokus penelitian adalah bagian yang penting mengingat melalui penelitian harus dapat membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian ditujukan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan lebih terperinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah dilakukannya penelitian umum. Dari penelitian umum ini akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial.

Fokus penelitian ini diantaranya adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu. Penelitian ini akan fokus pada peran-peran masyarakat, kegiatan, dan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan, serta analisis tangga partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata khususnya kerajinan tangan (*handcraft*) di Desa Junrejo Kota Batu.

2. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu. Terdapat beberapa aspek yang mendukung dan memberikan kendala dalam partisipasi masyarakat pembangunan desa wisata kerajinan tangan (*handcraft*) Junrejo. Faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu, khususnya di Desa Junrejo.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana berlangsungnya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti diharapkan dapat mendapatkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, termasuk lokasi, lingkungan, serta kegiatan yang berada didalamnya.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena Desa Junrejo mempunyai potensi wisata yang tidak dimiliki daerah lain yang kebanyakan memiliki potensi alam. Di Desa Junrejo Kota Batu memiliki pariwisata edukasi yang biasa disebut wisata edukasi kerajinan tangan (*handcraft*). Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan dari obyek yang akan diteliti, yaitu Dinas Pariwisata Kota Batu, Kantor Desa Junrejo, dan lingkungan masyarakat Desa Junrejo.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dalam Moleong (2004), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perkataan, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam melakukan penelitian, penulis harus menghasilkan data-data yang sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. Untuk pencarian data tersebut dibagi dalam dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau orang yang mengumpulkan data dengan cara wawancara narasumber yang sudah dipilih dan memiliki potensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu juga bisa didapatkan dengan cara melakukan turun lapang dengan pengumpulan data dalam bentuk catatan atau rekaman baik video, gambar, maupun suara tentang situasi yang sedang terjadi di lapangan. Data ini nantinya diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu:

- a. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Batu
- b. Kepala Seksi Pelayanan Desa Junrejo
- c. Anggota Pokdarwis (Ketua UMKM)
- d. Masyarakat wilayah wisata Desa Junrejo.
- e. Pengrajin *handcraft* di Desa Junrejo

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang tidak diperoleh secara langsung. Sumber sekunder ini sebagai penunjang atau melengkapi data primer seperti melalui bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi yang sudah ada dan tertulis.

Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi literatur : pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, karya ilmiah, berbagai pendapat ahli yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.
- b. Dokumentasi : pengumpulan data yang didapatkan dari intansi terkait dan data yang sudah ada secara tertulis di lokasi penelitian tersebut.

Data sekunder yang berupa dokumen, catatan arsip, serta laporan-laporan resmi yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu, antara lain Dinas Pariwisata Kota Batu, Dokumen Sekretariat Daerah kota Batu, Peraturan Walikota Batu, dan lain sebagainya.

Data skunder ini dapat diperoleh dari publikasi otentik, baik dari pemerintah maupun publikasi ilmiah. Adapun batasan dari data sekunder tersebut adalah sepanjang mendukung isi dan pembahasan yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berguna agar penelitian disusun secara sistematis, logis, dan pencarian data yang valid untuk proses analisis data dalam penelitian.

### 1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. *Indepth interview* adalah cara mengumpulkan data terhadap informan secara langsung dengan bertatap muka agar memperoleh data lebih lengkap serta mendalam.

Teknik ini melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku/aktor) sehubungan dengan realita atau fenomena yang dipilih untuk diteliti. Penggunaan *indepth interview* adalah untuk melengkapi bentuk struktur dari kata yang ditelaah, caranya yaitu melalui pengajuan pertanyaan kunci kepada informan yang diteliti. Pertanyaan yang ditujukan pada informan ada didalam pedoman wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau tanggapan dari kajian yang diteliti. Oleh karena itu, *indepth interview* akan menghasilkan data yang sifatnya mendalam.

Pertanyaan dalam penelitian ini hanya beberapa pertanyaan kunci yang sudah disiapkan dari *interview guide* dan akan membiarkan berbagai pertanyaan lanjutan untuk memperdalam data yang akan mengalir dengan sendirinya. Secara praktiknya di lapangan, juga disuguhkan pertanyaan seputar lingkup penelitian yang ditujukan pada responden utama. Untuk memperoleh validitas data, tentunya juga dilakukan usaha untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari setiap pertanyaan yang diutarakan.

Pelaksanaan penelitian ini tidak hanya terpaku pada *interview guide* yang ada, tetapi juga mengikuti alur dan kondisi pembicaraan dari pihak responden. Pelaksanaannya juga mengupayakan hasil yang diperoleh dari wawancara sifatnya jujur. Proses wawancara ini dikemas dalam suasana santai dan tidak terlalu formal, tujuannya adalah agar dapat menimbulkan kedekatan emosional antara kedua belah pihak.

## 2. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan, yaitu dengan tujuan agar terbentuknya pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian-kejadian yang dijelaskan atau terletak dari hasil wawancara dengan informan. Selain itu, akan mengamati kondisi lokasi penelitian, untuk mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Pengamatan langsung yang akan dilakukan adalah partisipasi pasif dimana peneliti datang dan mengetahui tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dipilih untuk menunjang fakta-fakta lapangan yang ditemui dalam proses penelitian. Cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen, arsip, buku, jurnal, dan artikel baik cetak maupun *web (online)*, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan suatu identifikasi serta penelusuran untuk mencocokkan data dari wawancara. Tujuan dari studi dokumentasi sendiri adalah untuk memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ada. Dokumentasi ini juga berupa rekaman (gambar, suara, video) data-data yang didapatkan di lapangan maupun data yang didapatkan dari literatur.

### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah dalam mengolah data. Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Sebelum bertemu narasumber untuk diwawancari, peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara yang menjadi acuan ketika proses wawancara. Pedoman wawancara berupa beberapa pertanyaan terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan kunci dan pertanyaan pendukung yang dibutuhkan selama penelitian. Pertanyaan dapat berkembang tergantung kondisi dan jawaban dari narasumber. Peneliti juga dapat memberi timbal balik (*feedback*) dari pernyataan atau jawaban dari narasumber, tidak hanya memberikan pertanyaan yang ditulis dalam pedoman wawancara. Segala pernyataan atau jawaban yang diberikan oleh narasumber bersifat penting untuk selanjutnya menjadi data dalam analisis dan pembahasan.

## 2. Pedoman Dokumentasi

Saat melaksanakan penelitian, pedoman dokumentasi digunakan untuk menyelidiki data-data tertulis dari buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Pada dasarnya pedoman dokumentasi terdiri dari garis besar data yang dapat menunjang penelitian.

## 3. Buku Catatan (*Field Note*)

Buku catatan sangat penting pada saat melakukan penelitian untuk mencatat hasil pengamatan atau temuan yang ditemukan pada proses pengumpulan data saat studi lapangan. Untuk itu penelitian ini selalu dilengkapi dengan satu buku kecil yang berfungsi untuk mencatat jawaban narasumber dan hasil pengamatan.

## 4. Alat Perekam (*Recorder*)

Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan alat perekam (*recorder*) agar mudah dalam mengulang ingatan dalam bentuk rekaman suara tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber..

## G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara memilah data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan dengan terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Pada penelitian ini peneliti mengambil konsep yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman. Beliau mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Berikut komponen analisis data dalam Sugiyono (2011), yaitu:

### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses yang merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi lainnya. Kondensasi data diperlukan dalam analisis data dimana data-data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kondensasi data juga berguna bagi peneliti untuk memudahkan mengolah dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah kondensasi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dengan penyusunan sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, gambar, serta berbagai kutipan penjelasan dari subyek penelitian. Dengan melihat penyajian data, harapannya dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hasil dari penyajian data dapat menghasilkan jawaban dan temuan-temuan selama penelitian yang telah dilakukan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Artinya, selama proses pengumpulan data dengan tetap meninjau data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan sudah lengkap, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. Peneliti dapat membuat kesimpulan atau hasil akhir berdasarkan data yang telah terkumpul selama penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Kota Batu

###### a. Kondisi Geografis

Kota Batu merupakan kota di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001. Kota Batu juga merupakan bagian dari Kabupaten Malang yang sebelumnya adalah Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang utara. Kota Batu merubah statusnya menjadi kota administratif pada tahun 2001 berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu yang telah disahkan oleh presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001.

Luas wilayah Kota Batu adalah 19.908, 72 hektar dan secara administrasi memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Dilihat dari letak astronomi Kota Batu terletak diantara 122°17'-122°57' Bujur Timur dan 7°44''-8°26' Lintang Selatan. Adapun wilayah Kota Batu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
3. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
4. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Dau, Kabupaten Malang



Kota Batu berada pada jalur transit yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur-jalur selatan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang indah sehingga banyak tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang, dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu sebagai daerah dingin.

#### **b. Pemerintah Kota Batu**

Secara administrasi, pemerintahan Kota Batu dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Sejak 2007, walikota Batu dan wakilnya dipilih langsung oleh warga kota dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kota.



**Gambar 4.2 Logo Kota Batu**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2017).

## 1. Visi dan Misi Kota Batu

### a. Visi :

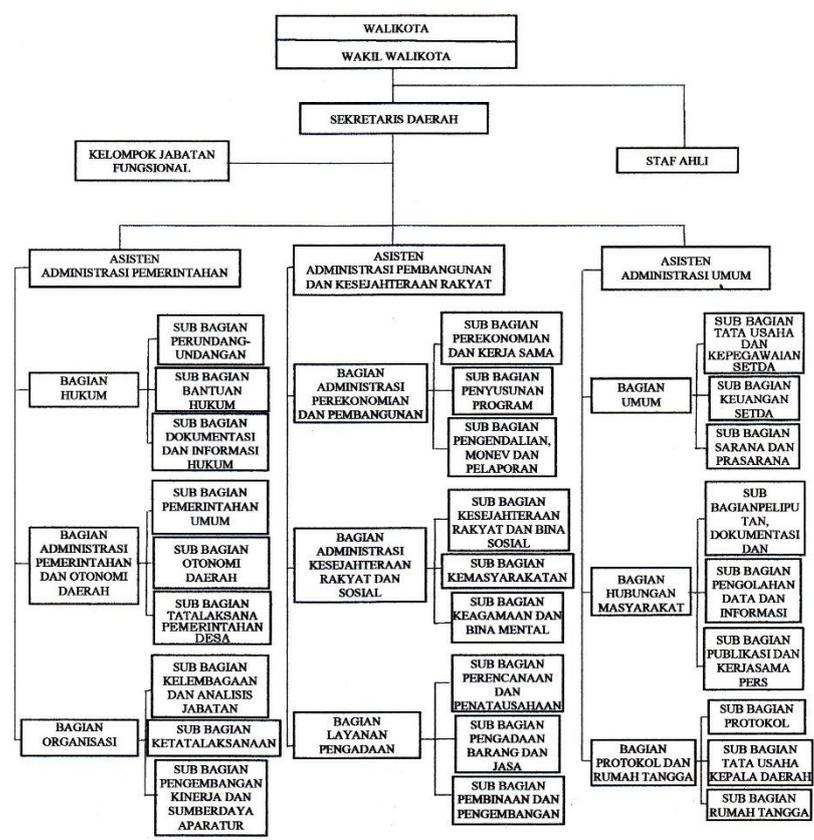
“Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional”

Ditunjang oleh pendidikan yang tepatguna dan berdayasaing ditopang sumber daya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

### b. Misi :

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik
4. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional
5. Optimalisasi pemerintahan daerah
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
7. Peningkatan kualitas kesehatan
8. Pengembangan infrastuktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM

## 2. Struktur Organisasi



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018)

### c. Potensi Wisata Kota Batu

Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama indah dan sejuk serta mempunyai kelebihan khusus yaitu dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, Gunung Bokong sehingga wilayah ini berpotensi untuk menjadi daerah wisata, jenis wisata yang ada di Kota Batu antara lain:

#### 1. Wisata Agro dan Wisata Bunga

Kota Batu memiliki ciri khas dengan agrowisatanya berupa tanaman bunga, apel, stroberi, jeruk, dan sayur-sayuran. Berikut objek wisata agro yang menawarkan wisata agro dan bunga, yaitu Kusuma Agrowisata yang menawarkan fasilitas seperti petik buah, kebun binatang, *mini green house*, dan tempat bermain anak-anak, kemudian terdapat juga Wisata Agro Punten dan Wisata Bunga Sidomulyo.

#### 2. Wisata Alam

Kota Batu yang memiliki kondisi geografis yang banyak dikelilingi pegunungan dan perbukitan dengan cuaca dan udara yang sejuk dan dingin sangat cocok untuk berwisata alam. Banyak wisatawan yang berdatangan hanya untuk melepaskan kepenatan atau sekedar *refreshing* dengan menikmati keindahan alam Kota Batu.

Adapun wisata alam yang dapat dinikmati di Kota Batu adalah Pemandian Air Panas Cangar, Pemandian Air Panas Songgoriti, *camping ground* Coban Talun, Taman Hutan Raya Junggo, dan Air Terjun Coban Rais dan berbagai air terjun dan wisata alam lainnya..

### 3. Wisata Budaya

Kota Batu merupakan kota yang masih kental dengan kebudayaan tradisionalnya, hal ini bisa dilihat dari masyarakatnya yang masih memegang teguh tradisi yang tumbuh dan berkembang. Keindahan kebudayaan Kota Batu bisa dilihat pada atraksi wisata seperti Sedekah Bumi, Gerebek Desa, Tari Sembrana dan Wisata Dokar.

### 4. Wisata Rekreasi

Di wilayah Kota Batu ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan yang kebanyakan pegunungan dan perbukitan untuk wisatawan, tetapi Kota Batu berhasil membangun tempat-tempat rekreasi wisata yang juga menjadikan daya tarik wisatawan, objek wisata di Kota Batu antara lain Taman Rekreasi Jatim Park, Taman Rekreasi Batu Night Spectaculer (BNS), kolam renang Selecta, dan Predator Fun Park.

### 5. Wisata Sejarah

Wisata sejarah yang ada di Kota Batu berupa situs peninggalan bangunan candi, rumah peristirahatan. Objek wisata sejarah yang dapat kita jumpai adalah Candi Supo Songgoriti, Wisma Bakti Selecta, Kartika Wijaya, dan Goa Jepang Coban Talun.

### 6. Wisata Religi

Wisata religi juga menjadi daya tarik untuk wisatawan yang menyukai seni arsitektur tua tempat peribadatan agama di Kota Batu. Obyek wisata religi yang bisa kita temui di Kota Batu seperti Masjid An-nur, Gereja Tua Jago, Vihara Budha Kertarajasa, dan Klenteng Dewi Kwan in Thong.

## 7. Wisata Minat Khusus

Di Kota Batu juga memiliki wisata minat khusus, yang dimaksudkan dengan wisata minat khusus ini lebih ke wisata dengan tema khusus seperti olahraga Arung Jeram, Paralayang, *Mountain Bike*, dan juga Bumi Perkemahan.

## 8. Wisata Kerajinan Tangan (*Handcraft*)

Kota Batu tidak hanya memiliki wisata berupa pemandangan alam, bangunan *artistic* dan budaya, tetapi di Batu juga memiliki wisata yang menyuguhkan kerajinan tangan, bahkan tidak hanya untuk membeli tetapi kita juga diajarkan bagaimana cara membuatnya. Wisata ini berada di Desa Junrejo dan di pinggiran Jalan Beji.

## 2. **Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengembangkan potensi wisata dan budaya yang ada di sekitaran Kota Batu. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Batu yang dipimpin oleh kepala dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota dalam bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

### **a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu**

Dinas Pariwisata yang berfungsi sebagai suatu organisasi pemerintahan, memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar program dan tujuan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Misi dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar bisa tercapai suatu tujuan didalam sebuah organisasi.

Adapun visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu:

a. Visi :

Terwujudnya Kota Wisata Batu sebagai sentra pariwisata yang unggul.

b. Misi :

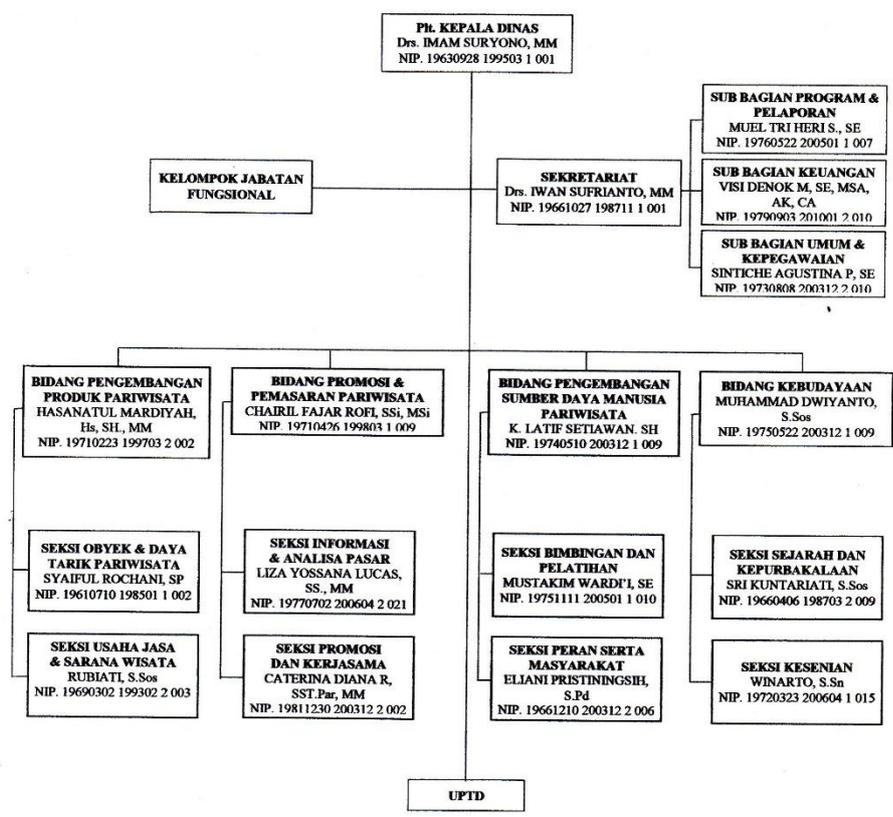
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
3. Mengembangkan desa atau kelurahan menjadi desa wisata yang berbasis potensi dan masyarakat.
4. Membangun kerjasama yang baik dengan *stakeholders* pariwisata
5. Melakukan promosi pariwisata secara *continue*

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu**



**Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2018)



### **c. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu**

Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan.

#### **1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu**

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan.
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **2. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota batu**

- a. Perumusan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di pariwisata dan kebudayaan.
- c. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan bidang kebudayaan dan pariwisata
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis daerah.
- e. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksana pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan dengan lembaga pemerintah instansi terkait.
- g. Pembinaan pengembangan objek wisata.

### 3. Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

- a. Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta arsip, sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan program kegiatan pengembangan produk pariwisata yang terdiri dari:
  1. Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata
  2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
- d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengembangkan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang promosi pemasaran pariwisata. Di bidang ini terdapat:
  1. Seksi Informasi dan Analisa Pasar
  2. Seksi Promosi dan Kerjasama

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, penyelenggaraan, dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Di bidang ini terdiri dari:

1. Seksi Bimbingan dan Latihan
2. Seksi Peran Serta Masyarakat

f. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menggali, melindungi, memelihara, memajukan, membina, dan melakukan koordinasi serta mengembangkan bidang kebudayaan, tradisi dan perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala.

Oleh karena itu di bidang ini terdiri dari:

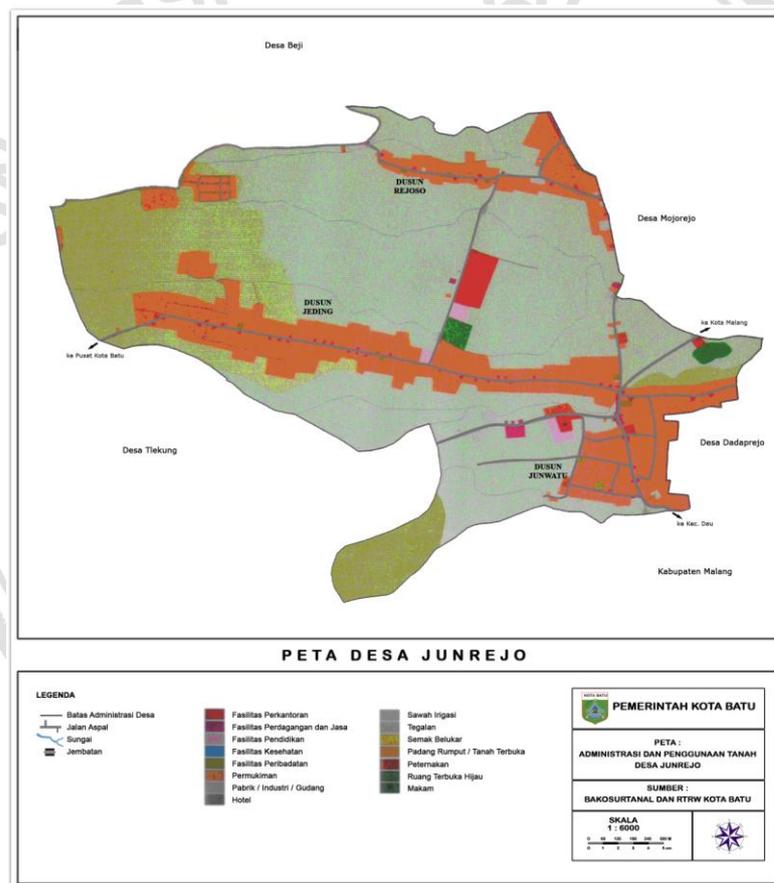
1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
2. Seksi Nilai-nilai Tradisional
3. Seksi Kesenian dan Perfilman

Program desa wisata ini berada dibawah naungan bidang pengembangan produk pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang terdiri dari seksi obyek dan daya tarik pariwisata serta seksi jasa usaha dan pariwisata. Selain itu bidang pengembangan sumber daya manusia dan pariwisata yang terdiri dari seksi bimbingan dan pelatihan, dan seksi peran serta masyarakat.

Bidang tersebut bertanggung jawab untuk mengajak serta masyarakat untuk berperan aktif dan saling mendukung satu sama lain dalam program ini, serta memberikan pelatihan-pelatihan demi berjalannya program desa wisata ini dengan baik.

### 3. Gambaran Umum Desa Junrejo

Desa yang bernama Junrejo berasal dari kata “Dyon Retjo” atau “Jun Watu”. Dyon menurut Bahasa Jawa kuno artinya tempat air gentong, sehingga Dyon Retjo atau Arca Dyon Watu bisa bermakna tempat air dari batu. Keberadaan Jun tersebut sejak abad IX atau Masa Kerajaan Tumapel/Singosari. Desa Junrejo terletak di Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur, Desa Junrejo memiliki luas wilayah 493,96 hektar, dan letak ketinggian Desa Junrejo dari permukaan laut adalah 700 meter.



Gambar 4.5 Peta Desa Junrejo

Sumber: Monografi Desa Junrejo (2017)

### a. Kondisi Geografis dan Topografi Desa Junrejo

Kondisi geografis dan topografi Desa Junrejo merupakan keadaan dan situasi alam yang ada di wilayah tersebut. Disamping itu juga terdapat luas wilayah dan batas-batas wilayah di desa tersebut. Luas lahan baik pemukiman, lahan pertanian/perkebunan, hutan, tempat rekreasi, serta lahan kosong yang dimiliki Desa Junrejo.

Lahan yang dimiliki Desa Junrejo tidak memiliki potensi alam seperti yang dimiliki desa lain, namun masyarakat desa produktif dalam kegiatan kerajinan tangan (*handcraft*). Wisata *handcraft* tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki masyarakat Desa Junrejo dalam meningkatkan pariwisata di Kota Batu.

#### 1. Batas Wilayah

- Utara : Desa Mojorejo dan Desa Beji
- Timur : Desa Dadaprejo dan Desa Sumber sekar
- Selatan : Desa Sumber Sekar Kec. Dau Kab. Malang
- Barat : Desa Tlekung

#### 2. Geografi Desa Junrejo

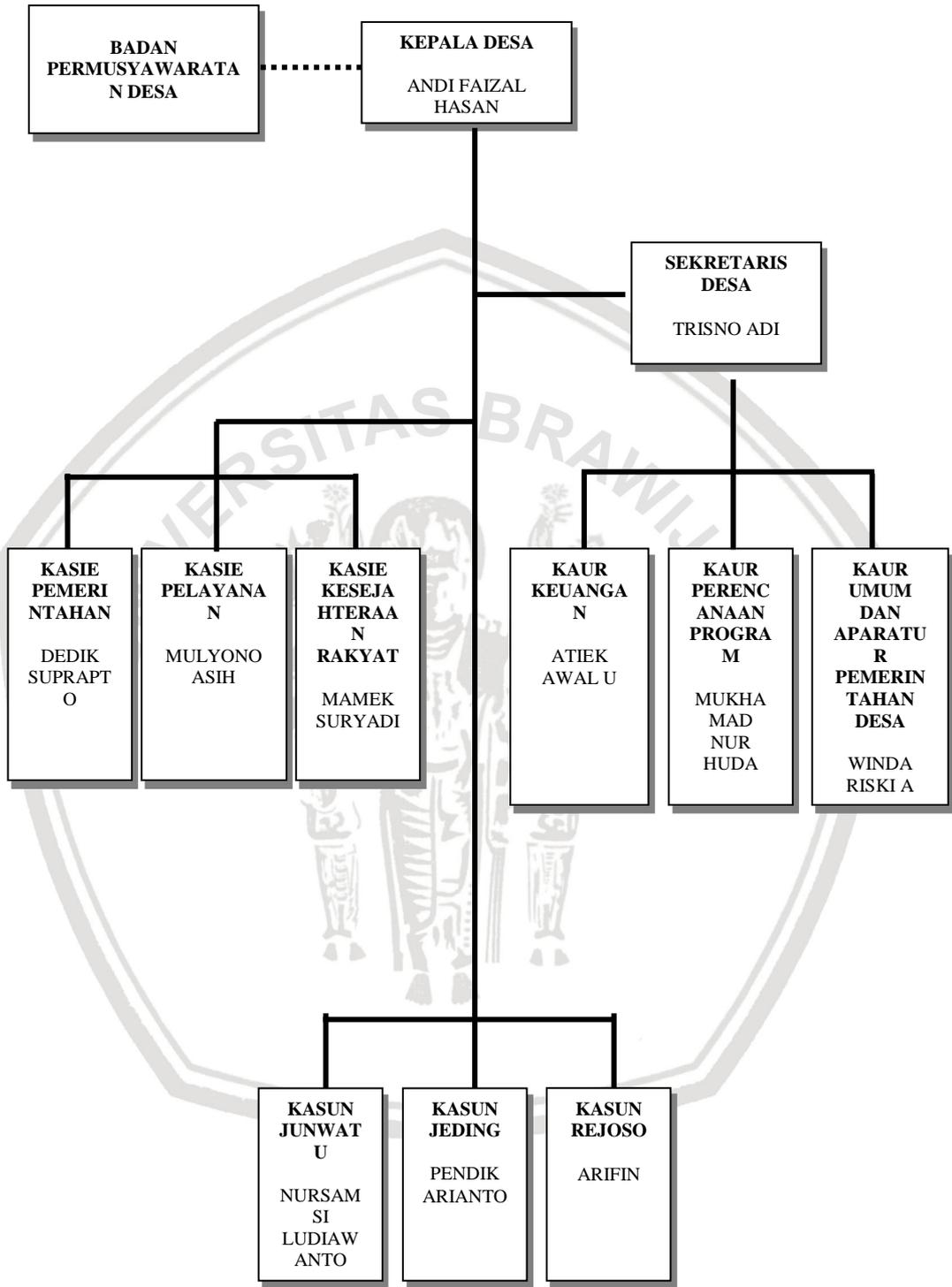
- Desa Junrejo terletak pada ketinggian : 700 mil
- Curah hujan rata-rata /tahun : 30 mm
- Keadaan suhu rata - rata : 28°C – 30°C

#### 3. Topografi Desa Junrejo

- Dataran : 56 Ha
- Areal Perbukitan / Pegunungan : 42 Ha

4. Permukiman
- Pemukiman Pejabat Pemerintah : 0,5 Ha
  - Pemukiman TNI / POLRI : 1,5 Ha
  - Pemukiman KPR / BTN : 2,5 Ha
  - Pemukiman Umum : 85 Ha
5. Data Bangunan
- Perkantoran : 5,9 Ha
  - Sekolah : 4 Ha
  - Pertokoan / Perdagangan : 3,5 Ha
  - Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Wihara) : 2 Ha
  - Makam Umum : 3 Ha
  - Jalan : 11 Ha
6. Pertanian Sawah
- Sawah Pengairan Tehnis ( irigasi ) : 221 Ha
  - Ladang / Tegalan : 69 Ha
7. Hutan : 8 Ha
8. Rekreasi dan Olahraga
- Lapangan Sepak Bola : 1,5 Ha
  - Lapangan Bola Voli : 0,5 Ha
9. Perikanan Darat / Air Tawar : 0,5 Ha
10. Lahan Terlantar / Tidur : 5 Ha

**b. Struktur Organisasi Desa Junrejo**



**Gambar 4.6 Struktur Organisasi Desa Junrejo**

Sumber: Sekretaris Desa Junrejo (2018)



### c. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Junrejo

Masyarakat Desa Junrejo sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan sebagian lain adalah pengrajin, pedagang, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polisi. Potensi wisata yang ada di Desa Junrejo adalah wisata kerajinan tangan (*handcraft*). Tidak sedikit masyarakat yang turut andil dan berprofesi sebagai pengrajin maupun pemilik dari pabrik-pabrik yang memproduksi *handcraft* tersebut.

Berbagai hasil produksi pasca panen telah dikelola dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya *home industry* sedang dan kecil. Kategori *home industry* sedang antara lain: souvenir, peralatan rumah tangga, pembuatan gamelan, sedangkan kategori *home industry* kecil berupa: anyam-anyaman dari plastik, keramik vas bunga, dan pembuatan peralatan pertanian.

Bidang usaha tersebut ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengiriman ke luar kota dan lintas pulau. Bahkan hasil *handcraft* tersebut juga telah dikirim sampai ke luar negeri. Dari keanekaragaman mata pencaharian masyarakat Desa Junrejo dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Junrejo sangat heterogen.

Keanekaragaman itulah yang membuat kehidupan warga Desa Junrejo menjadi rukun dan menumbuhkan rasa solidaritas antar warga dengan rasa saling menghargai dan saling membantu, serta gotong royong tanpa melihat ras, suku, agama dan golongan. Budaya masyarakat Desa Junrejo hingga saat ini belum terkontaminasi dengan adanya budaya barat.

#### **d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Junrejo**

Kantor Pemerintahan Desa Junrejo terletak di Dusun Junwatu yang berdekatan dengan wilayah Kantor Kecamatan Junrejo. Kantor Desa Junrejo sebagai pusat pelayanan masyarakat yang pada garis besarnya sebagai pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu :

1. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa Junrejo

Pemerintahan Desa Junrejo dalam melaksanakan kewajibannya ditunjang dengan adanya beberapa fasilitas, diantaranya :

1. Kantor Sekretariat Pemerintah Desa
2. Kantor Sekretariat BPD
3. Ruang PKK
4. Aula Kantor Desa
5. Kantor Sekretariat Karang Taruna
6. Kantor Sekretariat LPMD
7. Lahan Parkir
8. Mushola
9. Pos Linmas
10. Toilet
11. Dapur, dll

## **B. Tahap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Desa Junrejo Kota Batu**

Masyarakat adalah salah satu kunci disamping pemerintah dan pihak swasta dalam proses kemajuan suatu desa, sedangkan partisipasi merupakan salah satu peran penting yang dimiliki masyarakat dalam pembangunan desa tersebut. Desa Junrejo merupakan desa yang tidak memiliki potensi wisata alam, namun masyarakat di wilayah Desa Junrejo memiliki kegiatan sehari-hari membuat kerajinan tangan (*handcraft*). Sehingga membuat desa tersebut memiliki potensi wisata edukasi yaitu *handcraft*.

*Handcraft* atau kerajinan tangan merupakan kegiatan yang dimiliki dan dihasilkan oleh masyarakat Desa Junrejo berupa kerajinan anyaman bambu atau rotan, lampion, tempat tisu, cobek, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Kegiatan produksi *handcraft* yang dimiliki masyarakat dilakukan di pabrik-pabrik kecil rumahan (*home industry*) yang ada di lingkungan Desa Junrejo. *Home industry* tersebut dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Desa Junrejo sendiri, termasuk orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut. Sehingga, kegiatan produksi *handcraft* tersebut sekaligus menjadi mata pencaharian masyarakat yang dikenal sampai luar kota bahkan internasional.

Kegiatan dan produksi *handcraft* tersebut menjadikan Desa Junrejo memiliki potensi wisata edukasi kerajinan tangan yang turut membantu pembangunan pariwisata di Kota Batu. Masyarakat Desa Junrejo memiliki bentuk-bentuk partisipasi dalam tahapan pembangunan pariwisata di wilayahnya yang sesuai dengan konsep Ericson.

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Junrejo ditunjukkan dengan kegiatan dan produksi *handcraft*. Kegiatan tersebut mulai dari pembuatan sampai dengan penjualan yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu. Menurut Ericson, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan.

### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan**

Partisipasi pada tahap ini adalah pelibatan seseorang atau masyarakat pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan struktur atau tenaga pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan proyek pembangunan tetapi mereka juga mampu menggali, memahami, dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi. Partisipasi masyarakat merupakan peristiwa psikologis yang mencakup keterlibatan mental dan emosional. Dalam hal ini masyarakat dapat mengamati, memilih, menafsirkan berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan.

Bentuk partisipasi pada tahap ini ditunjukkan oleh masyarakat Desa Junrejo melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan persiapan masyarakat tentang *handcraft* maupun wilayah tersebut. Pihak pemerintah desa juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat tentang situasi dan kondisi yang ada di Desa Junrejo.

Kegiatan rapat dan pertemuan tersebut dilakukan oleh pihak aparat desa dengan beberapa tokoh masyarakat dan pengelola *home industry handcraft* seperti pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa untuk membahas kegiatan dan pengajuan dana seperti yang dikatakan oleh Bapak Tohu selaku Ketua UMKM sekaligus pengelola pabrik *handcraft* di Desa Junrejo

“...ya disini ada rapat musrenbang, sudah RT RW itu juga mengajukan dana dan kegiatan, ya saya sendiri itu saya ajukan, kemarin setiap ada rapat saya ikut terus.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Seperti yang telah dikatakan beliau, di Desa Junrejo terdapat pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang juga diikuti oleh pihak RT dan RW untuk membahas pengajuan dana dan kegiatan. Pada pertemuan tersebut masyarakat saling berdiskusi dan mengeluarkan pendapat tentang kekurangan yang dimiliki dan kebutuhan yang diperlukan untuk Desa Junrejo.

Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Desa Junrejo juga mengatakan terdapat pertemuan antar elemen Desa Junrejo meliputi pihak RT, RW, dan Kepala Dusun beserta beberapa perangkat desa untuk membahas potensi dan pembangunan di Desa Junrejo.

“...itu kemaren itu ada diundang temen-temen dari masing masing RT dan RW, lalu ada Kasun (kepala dusun) lalu ada perangkat desa.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2017).

Selain itu, pihak sekretaris desa dan Dinas Pariwisata juga melakukan survei lapangan di Desa Junrejo. Survei lapangan merupakan salah satu tahap yang diperlukan untuk melakukan analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dalam tahap survei lapangan, data yang dikumpulkan berupa informasi wilayah perencanaan, yaitu berupa peta wilayah desa dan data demografi.

“...iya mbak dulu pernah dilakukan survei sama Dinas, dalam survei itu ya memberikan data tentang keadaan Desa Junrejo saat ini, seperti data peta, data penduduk, sama data kondisi infrastruktur di sini, juga melihat lingkungan di Junrejo.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2017).

Survei lapangan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan Desa Junrejo secara fisik maupun non fisik. Dalam survei lapangan ini perangkat desa memberikan data tentang keadaan Desa Junrejo, data itu berupa data geografis, data demografis masyarakat Junrejo, serta data kondisi infrastruktur dalam berbagai aspek saat perencanaan tersebut.

“...iya, dulu pernah ada survei dari Kantor Kepala Desa untuk mengetahui potensi desa sini mbak, mereka ya melihat lingkungan Desa Junrejo, juga mengadakan forum gitu mbak, jadi masyarakat memberi masukan tentang keadaan di desa sini sama budaya yang ada di sini.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Disamping itu juga diadakan forum untuk memberikan informasi tentang potensi dan masalah yang ada di Desa Junrejo. Dalam forum tersebut masyarakat memberikan informasi tentang potensi yang bisa dijadikan kegiatan wisata nantinya, selain itu juga masyarakat memberikan informasi tentang permasalahan dalam aspek infrastruktur maupun aspek sumber daya manusia di Desa Junrejo.

“...masyarakat sudah aktif saat diadakannya musrenbang, selain itu juga ada forum dan diskusi di tingkat RT dan antar kelompok masyarakat membahas potensi wisata *handcraft*.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Kemauan masyarakat Desa Junrejo untuk terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sudah ada, hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang diundang, kemudian mereka yang terlibat secara langsung dalam memberikan masukan terhadap berbagai rumusan usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang akan diajukan kepada pihak pemerintah.

Didalam musyawarah perencanaan pembangunan, forum diskusi dan pertemuan antar elemen masyarakat tersebut, juga dibahas pemetaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Desa dan tokoh masyarakat. Pemetaan tersebut menghasilkan adanya kampung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kerajinan tangan (*handcraft*).

Masyarakat aktif dalam kegiatan produksi *handcraft* juga dikarenakan di Desa Junrejo belum ada potensi alam dan masyarakat sudah aktif dalam kegiatan produksi tersebut sejak dulu dan turun-temurun. Masyarakat terus mengembangkan kampung UMKM hingga pembangunan gapura dan pabrik-pabrik *home industry*.

“...saya dan semua pengurus Pokdarwis ada, cuman pemetaan ya itu kalau potensi alam kita ga punya, kita hanya penopang wisata aja kan kalau ada pengunjung lewat sini, cuman kita waktu itu mengusulkan ada satu kawasan, itu kampung UMKM (kerajinan tangan), ada Pak Tohu sebagai ketua UMKM dan sekarang sudah kita garap, desa sudah menggarap itu sebagai kampung wisata UMKM dan warga desa sudah sepakat, dan merencanakan pembangunan gapura kampung wisata UMKM untuk petunjuk adanya kampung UMKM.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2017).

Pemetaan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan potensi antar daerah di Desa Junrejo. Potensi di tiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Ada wilayah yang memiliki potensi kerajinan tangan (*handcraft*), ada juga kampung yang memiliki ciri khas budaya dan kesenian.

“...program termasuk pemetaan yang saya katakan tadi, di Rejoso itu ada kampung UMKM, di Gedig ada kampung kawasan budaya karena disana banyak kesenian-kesenian, di Junwatu ada potensi gamelan peninggalan lama itu, di Pande buat gong, pacul, dll itu sudah terkenal bahkan sampai ke luar negeri.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Junrejo juga ditunjukkan dengan adanya kegiatan studi banding. Kegiatan studi banding tersebut dilaksanakan oleh beberapa tokoh Kelompok Sadar Wisata, tokoh masyarakat, dan aparat desa yang difasilitasi oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan studi banding tersebut telah dilaksanakan beberapa kali diantaranya yaitu di Jogja, Bali, dan Lombok. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menambah wawasan dengan saling bertukar ilmu pengetahuan, informasi, dan implementasi di bidang pariwisata. Kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat potensi yang ada di wilayah mereka.

“...ada studi banding, ke Jogja, Bali, sama Lombok dua kali kita ajak mereka studi banding dengan harapan agar mereka sudah bisa membuka wawasannya mereka, setelah mindset mereka terbuka bisa diterapkan di desanya masing-masing dengan melihat potensi apa sih yang mereka punya setiap desa kan beda-beda kan pasti.” (Hasil wawancara Bapak Rendra, 2018).

Disamping itu, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mendampingi dan memfasilitasi dalam pembentukan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) yang bertujuan untuk menghimpun dan mengelola kegiatan pariwisata di Kota Batu.

“...kita memberikan fasilitas untuk pembentukan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), kebetulan kemaren kan kita ikutnya DPC Malang Raya kan, dan tahun ini alhamdulillah HPI sudah ada DPC Batu, nah disitu kan mereka selain pemasaran juga pengenalan Batu sendiri ke pariwisata.” (Hasil wawancara Ibu Eliani, 2018).

Beberapa bentuk kegiatan dan program yang dilakukan diatas merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Partisipasi dalam tahap perencanaan tersebut sebagai tahap awal dan modal persiapan untuk tahap selanjutnya yaitu partisipasi dalam tahap pelaksanaan.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini adalah pelibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek atau pembangunan. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud uang yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab dengan ikut terlibatnya mereka dalam memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan dana maka akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Keterlibatan masyarakat yang diberikan untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan program pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu juga dengan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dari pembangunan pariwisata di Desa Junrejo, khususnya dalam bidang kerajinan tangan (*handcraft*) adalah kegiatan produksi kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di pabrik-pabrik rumahan yang ada di wilayah itu. Terdapat banyak pabrik (*home industry*) *handcraft* yang ada di Desa Junrejo, salah satunya adalah pabrik kerajinan kayu milik Pak Tohu yaitu “Tohu Srijaya” yang berada di Jalan Trunojoyo RT 03 / RW 09, Dusun Rejoso.



**Gambar 4.7 Pabrik Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Bapak Tohu merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dikenal di Desa Junrejo dan di Kota Batu. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang bergerak di kelompok sadar wisata (Pokdarwis) saat itu. Saat ini beliau menjadi ketua UMKM di desa tersebut. Beliau merupakan orang yang aktif dan tekun dalam menggerakkan potensi wisata kerajinan tangan atau UMKM di Desa Junrejo.

Pabrik kerajinan kayu “Tohu Srijaya” memiliki kegiatan produksi di bidang olahan kayu yang memiliki produk alat-alat kebutuhan dapur dan alat-alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Produk-produk tersebut merupakan produk yang sering dicari oleh konsumen dan wisatawan atau turis yang datang di Kota Batu. Pabrik tersebut juga menerima pesanan dari konsumen atau wisatawan yang datang secara langsung untuk memesan dan membeli. Pabrik tersebut memiliki struktur organisasi untuk mempermudah pekerjaan di bidang masing-masing.



**Gambar 4.8 Struktur Organisasi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Pak Tohu menghimpun dan membantu masyarakat sekitar dengan menjadikan mereka sebagai pengelola dan pegawai pabrik tersebut sebagai mata pencaharian maupun pekerjaan sampingan masyarakat. Kegiatan produksi di pabrik tersebut dilakukan dengan diselingi canda tawa antar pekerja agar terkesan tidak kaku namun tetap fokus dan serius dalam bekerja. Hal seperti itu berfungsi untuk menciptakan situasi pabrik yang kondusif sehingga masyarakat dapat bekerja secara efektif dan merasa nyaman.

“...iya, jadi saya mempekerjakan orang-orang ya masyarakat sekitar sini mbak, tetangga sendiri, sama teman kerabat dekat gitu. Mereka bekerja juga santai, diselingi guyonan biar gak kaku gitu, cuman kerjanya ya tetep fokus serius lah.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Masyarakat yang bekerja di pabrik kerajinan kayu “Tohu Srijaya” merasa terbantu dengan adanya kegiatan produksi pabrik tersebut karena pekerjaan tersebut membantu perekonomian mereka dan meningkatkan *branding* kampung wisata *handcraft* di Desa Junrejo. Pekerjaan tersebut juga mengisi waktu kosong beberapa masyarakat yang habis bekerja di sawah dan kebun.

“...kita merasa terbantu juga mbak, membantu perekonomian kita juga, lumayan nambah penghasilan, paginya ke sawah siangnya kerja disini. Biar kampung sini terkenal juga, kan yang pesen ada yang dari luar kota juga.” (Hasil wawancara Ibu Ponisri, 2018).



**Gambar 4.9 Kegiatan Produksi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Hasil produksi dari pabrik kerajinan kayu tersebut bermacam-macam. Mulai dari alat-alat kebutuhan dapur, seperti spatula, cobek kayu, tempat gelas, dan lain-lain. Hingga kebutuhan rumah tangga seperti tempat tisu, alat pijat, pajangan dinding, kursi kecil, dan lain sebagainya.



**Gambar 4.10 Kegiatan Produksi Tempat Tisu Olahan Kayu**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Selain pabrik kerajinan kayu, juga terdapat pabrik-pabrik rumahan lainnya seperti pabrik rumahan cobek dan ulekan olahan batu milik Pak Sukir. Pabrik tersebut memiliki kegiatan produksi hasil dari batu alam dan semen yang dijadikan cobek dan ulekan. Batu alam tersebut diperoleh dari pengepul yang didatangkan dari sungai dan pegunungan.



**Gambar 4.11 Kegiatan Pembuatan Cobek Olahan Batu Alam**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Cobek dan ulekan adalah sepasang alat yang telah digunakan sejak dulu oleh masyarakat Indonesia untuk menumbuk, menggiling, melumat, dan mencampur bahan-bahan tertentu seperti bumbu dapur, rempah-rempah, jamu, atau obat-obatan. Cobek merupakan sejenis mangkuk dari batu atau semen sebagai alas untuk kegiatan menumbuk atau mengulek, sementara ulekan merupakan benda tumpul memanjang seperti pentungan yang dapat digenggam tangan untuk menumbuk atau mengulek suatu bahan.



**Gambar 4.12 Produksi Cobek dan Ulekan**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Cobek dan ulekan tersebut merupakan alat kebutuhan dapur yang sering dicari oleh masyarakat termasuk wisatawan. Banyak wisatawan yang memesan atau membeli langsung di pabrik rumahan karena banyaknya pabrik dan harga yang lebih murah. Produk cobek dan ulekan merupakan produk yang banyak dijumpai dan dijual di Desa Junrejo sepanjang jalan Malang-Batu atau Beji.

“...cobek sama ulekan itu salah satu barang yang dicari wisatawan mbak, apalagi cobek sini kan udah terkenal dan murah, siapa sih sekarang ibu-ibu yang ga butuh cobek buat kebutuhan dapur.” (Hasil wawancara Bapak Sukir, 2018).

Wisatawan yang berkunjung di Kota Batu untuk mencari *handcraft* dan souvenir akan diarahkan ke Desa Junrejo. Pihak kantor desa, pemilik pabrik, dan tokoh masyarakat saling melakukan koordinasi untuk pengarahan turis atau wisatawan yang ingin berkunjung dan mencari kerajinan.

“...kita minta kalau ada pengunjung misalnya turis atau tamu domestik untuk kerajinan ya kita arahkan ke Desa Junrejo.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2018).

Masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) juga memiliki andil dalam kegiatan pariwisata di Desa Junrejo. Pokdarwis membantu dengan mempromosikan desa wisata *handcraft*, menyambut dan mengarahkan wisatawan, mengikuti pelatihan-pelatihan *guide*, serta ikut hadir dalam kegiatan seminar yang ada.

“...memetakan potensi itu kemudian mempromosikan, menyambut tamu, lalu kita ada program pelatihan *guide*, lalu pameran terbuka.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2018).

“...ya kegiatan-kegiatan itu tadi, pelatihan-pelatihan untuk manajemen, pelatihan *packaging*, untuk pemasaran ya itu, lalu seminar-seminar dari Surabaya ya dari kementerian itu tadi.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Junrejo tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu. Masyarakat memiliki peran masing-masing dalam kegiatan pariwisata di desa tersebut. baik dari pemilik pabrik rumahan yang memiliki kegiatan produksi *handcraft*, pihak aparat desa dan dinas yang memberi fasilitas, hingga kelompok sadar wisata dan masyarakat lain yang mengikuti pelatihan dan mempromosikan wisata *handcraft* di Desa Junrejo.

### 3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pemanfaatan

Partisipasi pada tahap ini adalah pelibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga atau uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Setiap anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan setiap usaha bersama yang telah dilakukan. Sama seperti penyelenggaraan pemerintah daerah, rakyat atau masyarakat daerah dapat menikmati hasilnya secara adil. Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti manfaat materialnya, manfaat sosialnya, dan manfaat pribadi.

Hasil dari pelaksanaan pembangunan pariwisata yang telah dilakukan masyarakat, selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa. Masyarakat dapat menjaga dan melakukan perawatan fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pemerintah selaku penyelenggara di daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Pemerintah dapat saling berkoordinasi dengan masyarakat saat pemanfaatan dari hasil pembangunan dan kegiatan pariwisata. Fasilitas yang telah diberikan juga harus diawasi oleh pemerintah dan dijaga oleh masyarakat. Jika terdapat kerusakan atau kekurangan, masyarakat dapat mengajukan bantuan atau kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta untuk pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo ditunjukkan dengan beberapa program dan kegiatan, diantaranya adalah kegiatan mural yaitu dengan pengecatan tembok-tembok rumah warga dan daerah sekitaran pabrik-pabrik rumahan untuk mempercantik dan memperindah desa.

“...harapan warga sini itu pengen lah Desa Junrejo ini bisa lebih maju trus dikenal sebagai kampung wisata, itu sudah ada sebagian dibentuk seperti mural dan moral, moralnya itu kira sudah kita berambisi untuk kampung wisatanya dan muralnya itu tentang seninya, ya kaya gambar-gambar di tembok-tembok rumah warga sama sekitaran pabrik itu.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Gambar-gambar yang dilukis masyarakat sangat beranekaragam dan memiliki banyak makna dan gambar bebas sesuai keinginan masing-masing warga. Ada yang berisikan tentang bunga-bunga dan keindahan Kota Batu, ada yang memiliki tema teknologi, ada gambar tentang sejarah dan kesenian, hingga gambar-gambar kartun yang dapat menghibur anak-anak di desa tersebut. Warga yang menggambar mural tersebut merupakan orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang seni dan warga lain yang ingin menggambar.

Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan mural tersebut berasal dari iuran warga dengan sukarela dan tanpa paksaan. Warga yang berkenan membantu dapat memberi iuran berupa uang atau dapat langsung menyumbang cat dan bahan lainnya. Selain itu, warga yang memiliki pabrik juga memberikan dukungan dan bantuan berupa uang, bahan, serta fasilitas lain yang dapat membantu kegiatan.

“...ya patungan-patungan biayanya. Maunya ini semuanya harus begitu tapi ya masih keterbatasan biaya, dana cat itu banyak, lek gak ada yang nyupport ya seadanya saja.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Partisipasi lain yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo adalah pengelolaan dan manajemen pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh *home industry* dan masyarakat. Pemilik pabrik bekerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta dalam pemasaran produk mereka. Pengelola pabrik juga bekerjasama dengan masyarakat Desa Junrejo untuk membantu menjual dan memasarkan produk di sekitaran daerah pabrik perumahan di Desa Junrejo.

Pemilik dan pengelola pabrik juga bekerjasama dengan distributor dan penjual di daerah lain untuk memasarkan dan menjual produk-produk *handcraft* tersebut ke daerah atau kota lain. Produk-produk *handcraft* dari Desa Junrejo juga dapat ditemui masyarakat dan wisatawan di toko-toko sekitaran Beji dan dipinggir sepanjang jalan raya Malang-Batu.

“...produk-produk yang telah kita produksi kita pasarkan di sekitaran desa dan sepanjang jalan raya Malang-Batu itu. Selain itu, kita juga bekerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta dalam memasarkan produk kita.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Produk *handcraft* yang dipasarkan dan dijual bermacam-macam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Bidang Promosi & Pemasaran Pariwisata juga memiliki klasifikasi dan kriteria produk yang akan dipasarkan, seperti beberapa kerajinan kayu dan cobek. Produk-produk tersebut selanjutnya akan dipromosikan dan dipasarkan ke daerah atau kota-kota lain.

“...iya, jadi kita dari pihak dinas juga memiliki klasifikasi dan beberapa kriteria untuk produk yang kita ambil dan kita pasarkan ke kota-kota lain. Kalau yang pasti kan ya kerajinan kayu sama cobek itu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Hassanatul, 2018)

Pemasaran yang dilakukan oleh para pengrajin atau pemilik pabrik *handcraft* adalah dengan menjual di beberapa toko penjual kerajinan yang ada di kawasan Junrejo atau Beji sepanjang jalan raya Malang-Batu. Terlihat banyak sekali toko yang menjual kerajinan baik dari kerajinan kayu, cobek, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

Salah satu toko yang menjual *handcraft* di pinggir jalanan Junrejo-Beji adalah toko kerajinan milik Bapak Ahmad. Toko tersebut menjual beranekaragam produk kerajinan berbasis kayu. Beberapa contoh *handcraft* yang dijual di toko tersebut adalah keranjang, alat pijat, mainan, souvenir, peralatan memasak, perlengkapan rumah tangga, aksesoris, dan lain sebagainya.



**Gambar 4.13 Hasil Produksi Kerajinan Kayu**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Toko lain yang menjual hasil kerajinan tangan adalah toko yang juga berada di pinggir jalan raya Malang-Batu yang ada di wilayah Beji. Toko tersebut menjual beberapa barang yang terbuat dari olahan batu alam. Produk yang dijual diantaranya adalah cobek, ulekan, tungku, kendi, dan lain-lain.



**Gambar 4.14 Hasil Produksi Kerajinan Cobek**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Selain itu, juga terdapat toko lain yang menjual hasil kerajinan tangan (*handcraft*) yang berada di sekitaran Jalan Raya Beji. Toko tersebut menjual hasil kerajinan anyaman baik dari rotan maupun sintetis. Produk yang dijual juga sangat bermacam-macam dan beranekaragam warna. Kerajinan yang dijual diantaranya adalah lampion, lampu tidur, vas bunga, pot, meja, kursi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.



**Gambar 4.15 Hasil Produksi Kerajinan Anyaman dan Lampion**

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018).

Beberapa toko diatas adalah contoh dari sekian banyak toko yang menjual hasil kerajinan tangan (*handcraft*) dari Desa Junrejo. Harga yang ada di toko-toko tersebut juga bervariasi tergantung pemilik toko. Namun harga yang dipatok tersebut dapat ditawarkan oleh wisatawan atau pengunjung yang ingin membelinya. Harga yang ditawarkan penjual tentunya berbeda dengan harga yang dijual oleh pengrajin atau pemilik pabrik yang ada di Desa Junrejo.

Harga yang dimiliki tiap produk *handcraft* lebih murah jika langsung datang dan membeli di pabrik-pabrik di desa tersebut. Namun pihak kelompok sadar wisata dan pengelola kampung UMKM memiliki upaya untuk penyamaan atau pemerataan harga produk. Disamping itu juga berusaha tidak memasang harga terlalu tinggi dan menawarkan beberapa harga paket dari UMKM. Sehingga wisatawan atau konsumen tidak bingung dan merasa keberatan dari harga *handcraft* tersebut.

“...temen-temen pokdarwis mencoba supaya menyamakan harga di masing-masing produk, jadi enak ketika ada pengunjung. Disaat pengunjung datang itu harganya jangan mahal. Sempet dulu kita membuat paket harga dari umkm.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Pemerintah Desa Junrejo juga memiliki upaya dalam pemanfaatan pembangunan pariwisata, yaitu dengan membuatkan situs atau *website* Kampung UMKM kerajinan tangan. *Website* tersebut berguna memudahkan orang atau wisatawan yang akan atau sedang berkunjung di Kota Batu untuk mengetahui apa saja tentang *handcraft* dan wisata di Desa Junrejo.

“...kalau dari kita sudah dibuatkan website, nah itu kita sudah sempat diskusi dan kepala desa mendukung segala kegiatan.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2018).

### C. Analisis Tangga Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pemanfaatan

Berdasarkan penyajian data diatas telah dijelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut ditunjukkan dengan tiga tahap partisipasi menurut konsep Ericson, yaitu partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap pemanfaatan.

Arnstein juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang didasarkan oleh kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga partisipasi dibedakan berdasarkan tingkat kekuatan masyarakat dalam menentukan kegiatan. Pada model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat, yaitu Non-Partisipasi, Derajat Tanda Partisipasi, dan Derajat Kuasa Masyarakat.

Pada Derajat Non-Partisipasi (*Non Partisipation*) terdapat dua tangga partisipasi, yaitu Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*). Pada tangga pertama, yaitu Manipulasi bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi dan dialog, sedangkan pada tangga partisipasi kedua, yaitu Terapi telah ada komunikasi, namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah atau pemegang kekuasaan dan hanya satu arah.

Derajat Tanda Partisipasi (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemerintah atau pemegang keputusan.

Pada Derajat Tanda Partisipasi (*Degree of Tokenism*) terdapat tangga ketiga, keempat, dan kelima, yaitu Informasi (*Information*), Konsultasi (*Consultation*), dan Penentruman (*Placation*). Tangga ketiga, yaitu Informasi (*Information*) bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik. Tangga keempat, yaitu Konsultasi (*Consultation*) bahwa komunikasi telah bersifat dua arah, sudah ada penjaringan aspirasi, tetapi masih bersifat formalitas. Tangga kelima, yaitu Penentruman (*Placation*) bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pemngambil keputusan masih dipegang oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan.

Tiga tangga teratas, yaitu Kemitraan (*Partnership*), Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*), dan Kendali Warga (*Citizen Control*) merupakan tangga partisipasi dalam Derajat Kuasa Masyarakat (*Degree of Citizen Power*). Kemitraan (*Partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam posisi sejajar. Pendelegasian kekuasaan (*Delegated Power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambil keputusan telah dikuasai. Kendali Warga (*Citizen Control*) yaitu partisipasi masyarakat secara administratif maupun politik sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan, dan konsumsi dari kebijakan, bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan atau kegiatan.



**Gambar 4.16 Tangga Partisipasi**

Sumber: Arnstein (1971).

**1. Tangga Partisipasi dalam Tahap Perencanaan**

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Junrejo Kota Batu ditunjukkan dengan beberapa upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa yang berhubungan dengan perencanaan dan persiapan masyarakat tentang *handcraft* maupun wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam tahap ini yaitu rapat, survei, forum, dan musrenbang yang dilakukan oleh aparatur desa dengan masyarakat dan pengelola *home industry handcraft*. Pada kegiatan tersebut masyarakat saling mengeluarkan pendapat dan berdiskusi untuk memetakan potensi, pengajuan dana, serta kegiatan yang akan diadakan.

Pada kegiatan rapat, survei, forum, dan musrenbang yang dilakukan dalam tahap perencanaan tersebut merupakan tangga partisipasi Konsultasi (*Consultation*) karena masyarakat telah ada komunikasi yang bersifat dua arah, telah ada penjangkaran aspirasi, dan keberadaan masyarakat, baik antara para pemilik pabrik, pengrajin, dan tokoh masyarakat lain dengan pihak pemerintah desa. Meskipun telah ada komunikasi dua arah, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan tetap berada ditangan pemerintah.

Kegiatan lain yang terdapat dalam tahap perencanaan adalah kegiatan studi banding di Yogyakarta, Bali, dan Lombok, dan fasilitasi pembentukan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Batu yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata Kota Batu. Kegiatan tersebut berada dalam tangga partisipasi Penentruman (*Placation*), karena komunikasi telah berjalan dengan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, serta masyarakat telah dapat memberikan masukan lebih signifikan dalam kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam tahap perencanaan, telah terdapat dua tangga partisipasi, yaitu Konsultasi (*Consultation*) dan Penentruman (*Placation*). Meskipun kegiatan-kegiatan dalam tahap perencanaan tersebut terdapat dua tangga partisipasi yang berbeda, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berada dalam Derajat Tanda Partisipasi (*Degree of Tokenism*). Dua tangga partisipasi tersebut telah sama-sama terdapat komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah, namun keputusan atau kebijakan yang akan atau telah keluar tetap berada di tangan pemerintah.

## 2. Tangga Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan pariwisata khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo Kota Batu ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan produksi kerajinan (*handcraft*) yang dilakukan oleh para pengrajin dan masyarakat di pabrik-pabrik rumahan (*home industry*).

Beberapa kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan produksi yang ada di pabrik kerajinan kayu “Tohu Srijaya” milik Bapak Tohu. Pabrik rumahan tersebut memproduksi kerajinan olahan kayu seperti alat-alat kebutuhan dapur dan rumah tangga. Selain itu, juga terdapat pabrik rumahan milik Bapak Sukir yang memproduksi cobek dan ulekan dari olahan batu alam. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan tangga partisipasi Kendali Warga (*Citizen Control*) karena secara administratif dan pelaksanaannya, masyarakat sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan, masyarakat juga telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan lainnya ditunjukkan dengan adanya kegiatan dan koordinasi antara masyarakat yang mengelola tempat wisata di Desa Junrejo dengan pihak pemerintah desa dalam pengarahan turis atau wisatawan yang berkunjung, pelatihan *guide*, dan kegiatan seminar. Kegiatan partisipasi tersebut berada dalam tangga partisipasi Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*) karena masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan dan ruang pengambilan keputusan telah dipegang masyarakat.

Kegiatan produksi *handcraft* yang dilakukan masyarakat merupakan tangga partisipasi Kendali Warga (*Citizen Control*) karena masyarakat memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kegiatan. Sedangkan kegiatan pengarahan turis atau wisatawan yang berkunjung, pelatihan *guide*, dan kegiatan seminar merupakan tangga partisipasi Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*). Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata di Desa Junrejo tersebut merupakan tangga partisipasi yang masuk dalam kategori Derajat Kuasa Masyarakat (*Degree of Citizen Power*).

### **3. Tangga Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan**

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan wisata *handcraft* di Desa Junrejo ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan pemanfaatan wisata setelah adanya kegiatan pada tahap pelaksanaan yang telah dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya adalah kegiatan mural. Kegiatan mural merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pengrajin dan masyarakat Desa Junrejo untuk menggambar dan mengecat tembok atau dinding di sekitaran pabrik rumahan dan lingkungan warga. Tema gambar yang dibuat bermacam-macam seperti tentang sejarah, teknologi, dan kartun yang memiliki makna atau pesan moral dan menghibur. Dana yang dikeluarkan juga merupakan iuran dari para warga desa.

Kegiatan mural yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan tangga partisipasi Kendali Warga (*Citizen Control*) karena secara administratif dan pelaksanaannya, masyarakat sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan, masyarakat juga telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kegiatan.

Partisipasi lain yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan wisata *handcraft* di Desa Junrejo adalah pengelolaan dan manajemen pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh *home industry* dan masyarakat desa. Pemilik dan pengelola pabrik bekerjasama dengan masyarakat desa, distributor, dan pemerintah melalui Dinas Pariwisata Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Bidang Promosi, serta Pemasaran Pariwisata untuk menjual dan memasarkan produk kerajinan ke berbagai daerah. Harga yang dipasarkan juga berdasarkan kesepakatan dari pemilik dan pengelola *home industry*. Pengelolaan dan manajemen pemasaran tersebut merupakan tangga partisipasi Kemitraan (*Partnership*) karena masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemerintah dan pihak lain dalam posisi sejajar. Masyarakat telah dapat bekerjasama dan memiliki kesepakatan dengan pemerintah dan pihak lain yang terlibat.

Pemanfaatan lain dalam pembangunan wisata *handcraft* adalah pembuatan situs atau *website* Kampung UMKM *handcraft* Desa Junrejo. *Website* tersebut berguna untuk orang atau wisatawan yang akan atau sedang berkunjung untuk mengetahui apa saja yang ada di Desa Junrejo. Upaya tersebut termasuk dalam tangga partisipasi Informasi (*Information*) karena kebijakan dan komunikasi hanya satu arah tanpa ada peran dari masyarakat dalam pembuatannya.

Tangga partisipasi dalam tahap pemanfaatan terdapat dua kategori. Derajat Kuasa Masyarakat (*Degree of Citizen Power*), yaitu Kendali Warga (*Citizen Control*) dalam kegiatan mural serta Kemitraan (*Partnership*) dalam manajemen pemasaran, dan Derajat Tanda Partisipasi (*Degree of Tokenism*), yaitu Informasi (*Information*) dalam pembuatan *website*.

No.	Tahap Partisipasi	Kegiatan / Partisipasi	Tangga Partisipasi	Derajat Partisipasi
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Survei</li> <li>• Musrenbang</li> <li>• Forum</li> </ul>	Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	Derajat Tanda Partisipasi ( <i>Degree of Tokenism</i> )
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi banding</li> <li>• Fasilitasi HPI</li> </ul>	Penentruman ( <i>Placation</i> )	
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan produksi</li> </ul>	Kendali Warga ( <i>Citizen Control</i> )	Derajat Kuasa Masyarakat ( <i>Degree of Citizen Power</i> )
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarahan wisatawan</li> <li>• Pelatihan guide</li> <li>• Kegiatan seminar</li> </ul>	Pendelegasian Kekuasaan ( <i>Delegated Power</i> )	
3.	Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan mural</li> </ul>	Kendali Warga ( <i>Citizen Control</i> )	Derajat Kuasa Masyarakat ( <i>Degree of Citizen Power</i> )
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen pemasaran</li> </ul>	Kemitraan ( <i>Partnership</i> )	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan website</li> </ul>	Informasi ( <i>Information</i> )	Derajat Tanda Partisipasi ( <i>Degree of Tokenism</i> )

**Tabel 4.1 Tangga Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan**

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018).

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Desa Junrejo Kota Batu**

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan tersebut merupakan bentuk dari partisipasi yang dimiliki masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu. Pada pelaksanaan atau implementasi dalam kegiatan partisipasi pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya.

##### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan faktor yang penting dalam kegiatan pembangunan, karena faktor tersebut merupakan hal yang mendorong, membantu, dan meningkatkan kesuksesan atau kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi dari perilaku manusia itu sendiri untuk melakukan suatu tindakan untuk terlibat didalam suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu faktor utama yang mendukung adalah kemauan atau keinginan seorang individu atau masyarakat. Kemauan dari dalam masyarakat itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat didalam suatu kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas mereka sebagai masyarakat setempat. Sehingga mereka tergerak untuk terlibat di dalam kegiatan pembangunan tersebut. Animo atau antusias masyarakat yang aktif dan tinggi dalam berpartisipasi di setiap program atau kegiatan sangat mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan program atau kegiatan tersebut.

“...kalau masyarakat itu sangat antusias, sebenarnya itu animonya tinggi, kalau gak tinggi gak mungkin terbentuk suatu kerajinan yang sudah dikenal masyarakat luas ini, bahkan sudah lama turun-temurun.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2018).

Masyarakat di Desa Junrejo pada umumnya ikut berpartisipasi apabila mereka merasa aktivitas tersebut penting dan merupakan kebutuhan serta menjadi prioritas mereka, sehingga ada dasar kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat sudah memiliki kemauan atau keinginan untuk terlibat didalam kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam memberikan bantuan dalam bentuk tenaga.

Untuk keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan dana atas dasar kemauan dari masyarakat itu sendiri masih rendah. Meskipun terdapat iuran dalam beberapa kegiatan, masyarakat masih mengandalkan bantuan dana dari pihak pemerintah, baik dari dinas maupun kantor desa. Beberapa pengrajin dan pemilik pabrik *handcraft* juga bekerjasama dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau pihak swasta lainnya.

“...kalau karang tarunanya itu ya aktif, peduli, ya antusias. Mereka ya membantu kalau ada kegiatan. Mural tembok itu, trus beberapa ikut seminar sama pelatihan juga.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018)

Keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pariwisata telah ditunjukkan dengan kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian, dan keterampilan. Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan pariwisata. Segala bentuk bantuan baik berupa tenaga maupun sumbangan dana atau uang sangat membantu kegiatan tersebut.

Keterampilan atau kreativitas juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan pariwisata khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo. Masyarakat yang terampil dan kreatif, serta memiliki inovasi atau menciptakan sesuatu yang baru menghasilkan ide dan gagasan baru yang akan mendukung peningkatan kegiatan produksi kerajinan tangan.

“...alhamdulillah masyarakat sini itu kreatif, terampil. Mereka bisa bikin sesuatu yang baru yang bikin orang senang juga gitu lho sama produknya.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Batu juga menjadi faktor pendukung pembangunan pariwisata di Desa Junrejo. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan dan mengasah keterampilan yang dimiliki oleh para pengrajin. Bentuk pelatihannya juga bermacam-macam seperti pelatihan manajemen, pelatihan *packaging*, pelatihan pemasaran, serta menjadi peserta seminar-seminar yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan lainnya.

“...ya kegiatan-kegiatan itu tadi, pelatihan-pelatihan untuk manajemen, pelatihan *packaging*, untuk pemasaran ya itu, lalu seminar-seminar dari Surabaya ya dari kementerian itu tadi.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Disamping pelatihan, para pengrajin dan masyarakat yang aktif dan tergabung dalam kelompok sadar wisata dan UMKM Desa Junrejo juga diberikan fasilitas berupa studi banding dengan daerah lain. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan beberapa kali diantaranya di Jogjakarta, Bali, dan Lombok. Studi banding bertujuan untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dengan melihat dan mempelajari kegiatan sistem kepariwisataan di daerah lain tersebut sehingga masyarakat lebih peka dengan potensi yang ada di desanya.

“...ada studi banding, ke Jogja, Bali, sama Lombok dua kali kita ajak mereka studi banding dengan harapan agar mereka sudah bisa membuka wawasannya mereka, setelah mindset mereka terbuka bisa diterapkan di desanya masing-masing dengan melihat potensi apa sih yang mereka punya setiap desa kan beda-beda kan pasti.” (Hasil wawancara Bapak Rendra, 2018).

Faktor lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan wisata *handcraft* di Desa Junrejo adalah faktor budaya. Kebiasaan keterampilan dan kreativitas masyarakat sejak dulu membuat kerajinan tangan telah menjadi kegiatan sehari-hari. Kebiasaan tersebut juga berubah menjadi mata pencaharian, baik utama maupun sampingan masyarakat yang juga bekerja menjadi petani. Kebiasaan masyarakat membuat kerajinan tidak hanya sebatas mengolah kayu dan batu, namun juga berkembang pada souvenir dan olahan makanan.

“...kalau *handcraft*nya dari mulai 70-an itu sudah jalan, kerajinan kayu, setelah itu berlangsung adanya inovasi oleh generasi muda membuat souvenir dan olahan makanan.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Kebiasaan yang menjadi budaya keseharian masyarakat Desa Junrejo membuat kerajinan tangan (*handcraft*) itu sudah dilakukan turun-temurun. Popularitas kerajinan tangan di desa tersebut, seperti cobek juga telah diteliti dan dibuatkan dokumenter oleh beberapa mahasiswa Universitas Brawijaya. Kondisi masyarakat yang berada di daerah pedesaan juga membuat masyarakat harus bekerja dengan memanfaatkan peluang dari kerajinan tangan tersebut. Ada masyarakat yang dari pagi bekerja di pabrik rumahan, ada juga masyarakat yang bekerja saat siang hari ketika mereka selesai bekerja dari sawah atau kebun.

“...potensi desa sini ya kerajinan tangan umkm itu, yang udah lama dikenal dan udah turun-temurun, itu juga ada anak brawijaya yang membuat dokumenter tentang sejarahnya cobek.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2018).

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Faktor penghambat menjadi bahan evaluasi yang nantinya dapat dikaji ulang dan diperbaiki oleh semua pihak. Hambatan-hambatan tersebut merupakan hal yang wajar muncul didalam suatu program atau kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Ada beberapa kendala atau hambatan yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu, salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan mereka sendiri.

Kurangnya komitmen dan kesadaran masyarakat Desa Junrejo juga menjadi faktor penghambat pembangunan wisata di desa tersebut. Meskipun para pengrajin dan pemilik pabrik sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan meningkatkan kegiatan pariwisata handcraft di desa tersebut, jika masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan tidak memiliki komitmen akan menghambat perkembangan pariwisata tersebut.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pembangunan, maka masyarakat selaku sumber daya harus memiliki komitmen dan saling mendukung satu sama lain untuk dapat menggali dan memaksimalkan potensi yang ada.

“...iya sebenarnya masyarakat sini itu udah aktif mbak, udah mau diajak kerja. Cuma ya itu lho, komitmennya kurang. Ya meskipun masih ada yang terus aktif, tapi banyak juga yang kurang gerak. Apalagi orang desa kan pikirannya duit, jadi kadang kalau gak menghasilkan duit apa gak ada duitnya gitu ya males.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Rendahnya tingkat pendidikan formal pada masyarakat Desa Junrejo juga menjadi penghambat pembangunan pariwisata di desa tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang bekerja di pabrik atau menjadi pengrajin mengenyam pendidikan yang cukup. Banyak dari mereka yang hanya menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun tidak sedikit juga yang memiliki pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Namun, generasi muda sekarang menjadi harapan bagi Desa Junrejo. Kemajuan perekonomian masyarakat desa tersebut berdampak bagi anak cucu mereka. Banyak remaja di desa itu yang menempuh pendidikan hingga SMA, bahkan ada juga yang hingga menempuh perguruan tinggi. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh, bisa menjadi harapan agar mereka lebih terampil dan kreatif untuk mengembangkan wisata di desa tersebut.

Faktor perekonomian memang juga mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pemikiran lebih mementingkan menghasilkan uang dengan instan, seperti dengan bertani dan menjadi buruh. Sehingga ilmu dan pengetahuan mereka menjadi terbatas.

“...kalau yang bekerja di pabrik ya begitu mbak banyak yang Cuma lulusan SD sama SMP, tapi juga ada lah yang SMA. Lha masyarakat pikirannya yang penting dapet uang, jadi ya mending kerja jadi tani apa buruh gitu, kalau orang dulu kan emang banyak yang putus sekolah gara-gara kondisi perekonomian to. Kalau anak-anak muda yang sekarang itu udah mulai bagus banyak yang lulus SMA, bahkan ada yang kuliah juga.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Faktor lain yang menjadi hambatan kegiatan dan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo adalah minimnya lahan untuk parkir kendaraan wisatawan dan jalanan desa yang sempit. Pengrajin dan pengelola kebingungan jika terdapat wisatawan yang akan berkunjung dengan menggunakan transportasi bis atau rombongan. Tidak ada lahan luas yang dapat menampung kendaraan besar, apalagi dengan jalan yang sempit. Kondisi tersebut menjadi masalah yang serius karena menjadi penyebab terkendalanya wisatawan menikmati wisata disitu.

“...kita minta kalau ada pengunjung misalnya turis atau tamu domestik untuk kerajinan ya kita arahkan ke Desa Junrejo, datang bisnya trus bisnya ditaroh dimana, sedangkan masuk ke kampung itu kan sempit, itu kendalanya.” (Hasil wawancara Bapak Tohu, 2018).

Selain tidak adanya lahan parkir yang cukup untuk parkir dan menampung kendaraan besar, akses jalan yang sempit juga menjadi kendala wisatawan untuk masuk ke Desa Junrejo. Wisatawan merasa kesulitan ketika mereka akan datang ke lokasi, seperti tempat pameran atau pabrik rumahan yang memproduksinya. Tidak sedikit wisatawan yang ingin melihat secara langsung proses dan kegiatan masyarakat dalam pembuatan *handcraft*. Akses jalan yang sempit tersebut jelas menjadi hambatan kegiatan pariwisata di desa tersebut.

“...kegiatan kadang terhambat jalan yang sempit sehingga sering wisatawan-wisatawan kesusahan untuk mengunjungi kampung wisata ini.” (Hasil wawancara Bapak Mulyono, 2018)

Beberapa kendala dan kekruangan diatas merupakan contoh dari sekian banyak faktor penghambat pembangunan pariwisata, khususnya di Desa Junrejo. Kendala merupakan faktor internal dan eksternal, serta faktor alam dan manusia yang wajar dijumpai. Hambatan-hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi, baik dari masyarakat atau pemerintah untuk dapat diperbaiki.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo ditunjukkan dengan tiga (3) bentuk partisipasi dan dianalisis berdasarkan tangga partisipasi. Tiga tahap tersebut yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap pemanfaatan.

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ditunjukkan dengan adanya rapat dan pertemuan serta musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak aparat desa dan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat juga melakukan survei lapangan serta pemetaan lahan dan potensi. Selain itu juga terdapat studi banding yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ditunjukkan dengan kegiatan produksi kerajinan tangan (*handcraft*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Junrejo. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat berupa kerajinan kayu, kerajinan cobek, dan lain sebagainya. Koordinasi juga dilakukan oleh masyarakat, kelompok sadar wisata, pemilik pabrik, dan aparat desa untuk mempromosikan *handcraft* dan mengarahkan wisatawan. Pelatihan *guide* dan seminar juga terus dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan.

3. Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan ditunjukkan dengan kegiatan mural dengan pengecatan tembok-tembok di sekitar pabrik dan rumah warga, manajemen pemasaran untuk dapat memaksimalkan produksi dan penjualan *handcraft*, pemerataan harga *handcraft* dan menyediakan harga paket untuk memudahkan wisatawan atau turis. Pemerintah desa juga mendukung dengan membuat situs atau *website* tentang wisata *handcraft* dan Desa Junrejo.
4. Tangga partisipasi dalam tahap perencanaan yaitu Konsultasi (*Consultation*) dan Penentruman (*Placation*) dalam kategori Derajat Tanda Partisipasi (*Degree of Tokenism*). Tangga partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu Kendali Warga (*Citizen Control*) dan Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*) dalam kategori Derajat Kuasa Masyarakat (*Degree of Citizen Power*). Tangga partisipasi dalam tahap pemanfaatan yaitu Kendali Warga (*Citizen Control*) dan Kemitraan (*Partnership*) dalam kategori Derajat Kuasa Masyarakat (*Degree of Citizen Power*), serta Informasi (*Information*) dalam kategori Derajat Tanda Partisipasi (*Degree of Tokenism*).
5. Faktor pendukung berupa kemauan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam membuat *handcraft*, kegiatan pelatihan, seminar, dan studi banding, serta faktor budaya atau kebiasaan sejak dulu masyarakat Desa Junrejo membuat *handcraft* juga menjadi faktor pendukung adanya kegiatan pariwisata di desa tersebut. Faktor penghambat berupa ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, baik dana maupun kegiatan, rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian, serta tidak adanya lahan yang luas untuk parkir kendaraan besar dan akses jalan yang sempit.

## **B. Saran**

### **1. Saran Akademis**

- a. Mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang memiliki objek atau kajian yang sama dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pembahasan. Penelitian selanjutnya dapat menambah pembahasan seperti peran yang lebih mendalam dari pihak UMKM, kelompok sadar wisata, atau kelompok para pemuda di Desa Junrejo. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai program dan kegiatan pariwisata dari aktor-aktor yang terlibat di daerah tersebut.
- b. Penelitian ini belum menemukan transparansi dana dari perencanaan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo untuk kebutuhan penelitian, baik dari Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, maupun masyarakat. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam tentang dana yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk program atau kegiatan pariwisata di Desa Junrejo.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh pembaca, baik rekan-rekan mahasiswa yang lain, organisasi intra dan ekstra kampus, atau seluruh civitas akademika kampus tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata. Pada penelitian ini juga masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti selalu terbuka untuk menerima kritik, saran, dan pertanyaan bagi rekan-rekan mahasiswa atau pihak lain.

## 2. Saran Praktis

- a. Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan pariwisata di Desa Junrejo sebenarnya sudah cukup baik, namun beberapa instansi kurang koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Seperti koordinasi dan komunikasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, dan masyarakat, sehingga terdapat kendala dan kekurangan di beberapa rencana dan implementasi program atau kegiatan yang akan atau telah dilakukan. Diharapkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Desa Junrejo lebih diperbaiki dan ditingkatkan untuk kelancaran program dan kegiatan.
- b. Beberapa informan dari pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang begitu terbuka untuk memberikan informasi kepada peneliti tentang pemerintah, baik mengenai program, kegiatan, maupun dana atau keuangan. Seharusnya informan dari pemerintah tetap terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada mahasiswa (peneliti) karena informasi apapun sangat penting bagi penelitian.
- c. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Junrejo lebih memiliki komitmen dan kontribusi dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, khususnya wisata *handcraft* di Desa Junrejo. Masyarakat juga diharapkan lebih kreatif dan terus berinovasi dalam memproduksi *handcraft* agar terus tercipta kerajinan yang baru dan beranekaragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cohen, J.M. dan Uphoff, N.T. 1977. *Rural Development Participation*. New York: Cornell University RDCCIS.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell, John W. 2013. *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Deviyanti, Dea. 2013. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tenngah. eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (2): 380-394. ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fandeli, Chafid. 2002. *Pengembangan Kawasan Pedesaan Sebagai Obyek Wisata (Identifikasi Potensi dan Perencanaan Model Pariwisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi*. Laporan Penelitian UGM. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Inskeep, Edward. 1995. *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Islamy, M. Irfan. 2004. Membangun Masyarakat Partisipatif. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol. IV No.2. Hal.3-9 2004. Kota Malang: Universitas Brawijaya.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Penerjemah Tjetjep Rohendi*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No.P.M.04/UM.001?MKP/2008 Tentang Sadar Wisata.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No.K.M18/HM/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007 Tentang Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Pasal 28 Tentang Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2015.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Purnomo, Aris Tri Cahyo. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyadi dan Baratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Salusu, J. 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Grasindo.
- Santoro, Sastropetro. 1988. *Partisipasi dan Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Septian, Rendra Wahyu. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Analisis Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Banjaran dalam Perencanaan Prodamas di Kota Kediri). Kota Malang: Universitas Brawijaya.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Slamet. 2004. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sudiongko, Anggara. Malangtimes.com. "Jumlah Pengunjung Wisata Malang dan Batu Meningkat". <https://www.malangtimes.com/malang-tourism/search/?q=tahun+2015+Jumlah+wisatawan+berkunjung+3%2C5+juta+jiwa%2C+Malang+3%2C6+juta+jiwa+%28malangtimes.com>  
Diakses pada tanggal 20 April 2017 Pukul 16.00 WIB.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/175/KEP/422.012/2009 Tentang Penetapan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mitra Pariwisata.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 259 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 4 Huruf (d) Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2  
**KOTA BATU**

Batu, 14 Desember 2017

Nomor : 072/2722/422.205/2017  
 Lampiran :  
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada  
 Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
 Penelitian Dan Pengembangan Daerah  
 Kota Batu  
 2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu  
 3. Camat Junrejo Kota Batu  
 Di -

**B a t u**

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 18305/UN10.F03.11.11/PN/2017 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : YENNI RIZQI AULIANDI  
 NIM : 125030607111042  
 Jurusan : Administrasi Publik  
 Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang  
 Alamat : Jl MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata (Studi Pada Kelompok Sadar Wisata Desa Junrejo Kota Batu)

Data yang dicari : - Rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis dinas, rencana kerja pemerintah daerah wawancara Kecamatan Junrejo Kota Batu  
 - Pokdawis Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Lokasi : 1. Bappelitbangda Kota Batu  
 2. Dinas Pariwisata Kota Batu  
 3. Kecamatan Junrejo Kota Batu  
 4. Pokdarwis Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Peserta : -

Waktu : 13 Desember 2017 s/d 13 Januari 2018

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.  
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU  
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA BATU

  
**SULIYANA, S.Sos**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19630416 198603 2 017

**Tembusan :**  
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
 Universitas Brawijaya Malang



### Lampiran 2. Surat Disposisi Dinas Pariwisata



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PARIWISATA**  
 Balai Kota Among Tani, Gedung A Lantai 2  
 Jl. Panglima Sudirman No.507, Kota Batu, Kode Pos 65313  
 Email : disparta@batukota.go.id

---

**LEMBAR DISPOSISI**

1. RAHASIA                      2. PENTING                      3. RUTIN

Surat Dari : <i>Kerbangpol</i>	Diterima Tanggal : <i>21 Des 2017</i>
Tanggal Surat : <i>14 Des 2017</i>	Nomor Agenda : <i>26</i>
Nomor Surat : <i>072/2422/422-205/2017</i>	Diteruskan Kepada :
Perihal : <i>Ijin Penelitian Yenni Ruspi Aulhandi FIA/UB Malang 16 Des 2017 s/d 19 Januari 2018</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas</li> <li>2. Kabid Promosi dan Pemasaran Produk Pariwisata</li> <li>3. Kabid Kebudayaan</li> <li>4. Kabid Pengembangan Produk Wisata</li> <li>5. Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata</li> </ul>

**ISI DISPOSISI**

*- Dibantu*      *21/12/2017*

*20  
24/12/17*

Universitas Brawijaya Malang



Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Desa Junrejo



**PEMERINTAH KOTA BATU  
KECAMATAN JUNREJO**  
Jalan Raya Junrejo Nomor 1 Kota Batu Kode Pos 65321  
Telepon / Fax (0341) 463877

Batu, 28 Desember 2017

Nomor	: 072 / / 422.320 / 2017	Kepada	
Sifat	: Segera	Yth.	Kepala Desa Junrejo
Lampiran	: -	Di	
Perihal	: Ijin Penelitian		<b>BATU</b>

---

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 072/2422/422.205/2017 perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama	: YENNI RIZQI AULIANDI
NIM	: 125030607111042
Jurusan	: Administrasi Publik
Fakultas/Universitas	: FIA/ UNIBRAW Malang
Alamat	: JL. MT. Haryono Malang

Bermaksud mengadakan Permohonan Data pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Tema /Judul	: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata (studi pada Pokdarwis Desa Junrejo)
Data yang di cari	: - Rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis dinas , rencana kerja pemerintah daerah - Pokdarwis Desa Junrejo
Lokasi	: Desa Junrejo
Peserta	: -
Waktu	: 13 Desember 2017 -13 Januari 2018

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. CAMAT JUNREJO  
Kasubas Umum dan Keuangan



**RENI SUHARYATI, SH**  
Penata (III/c)  
NIP. 19661224 200701 2 010

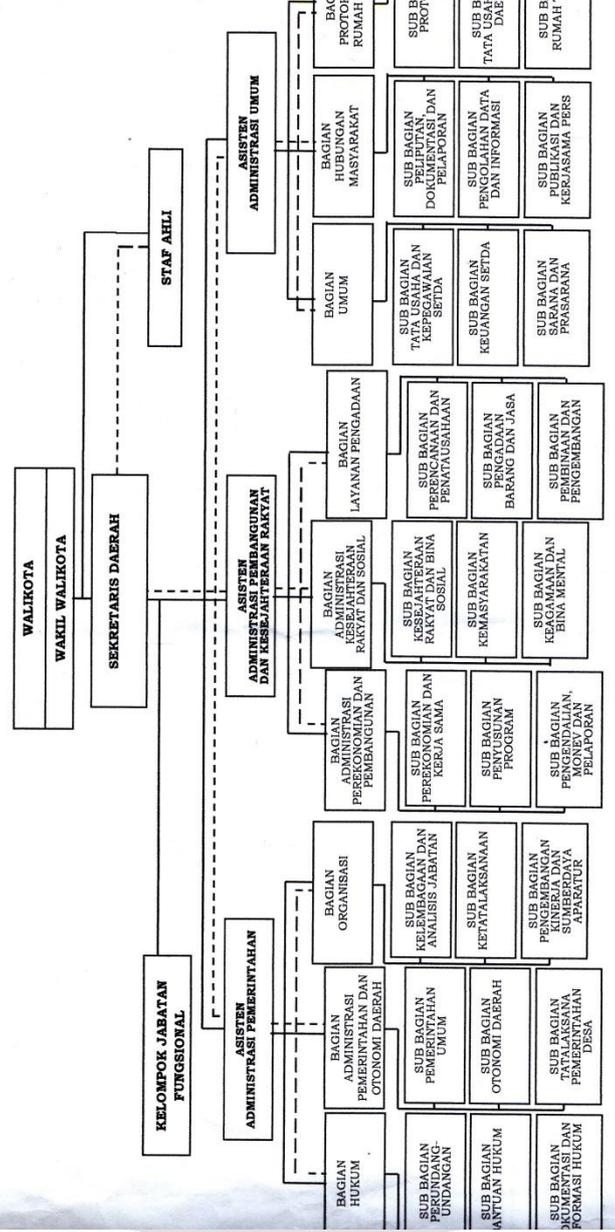




Lampiran 4. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu

Lampiran Peraturan Walikota Batu  
 Nomor : 68 Tahun  
 Tanggal : 20 Desember

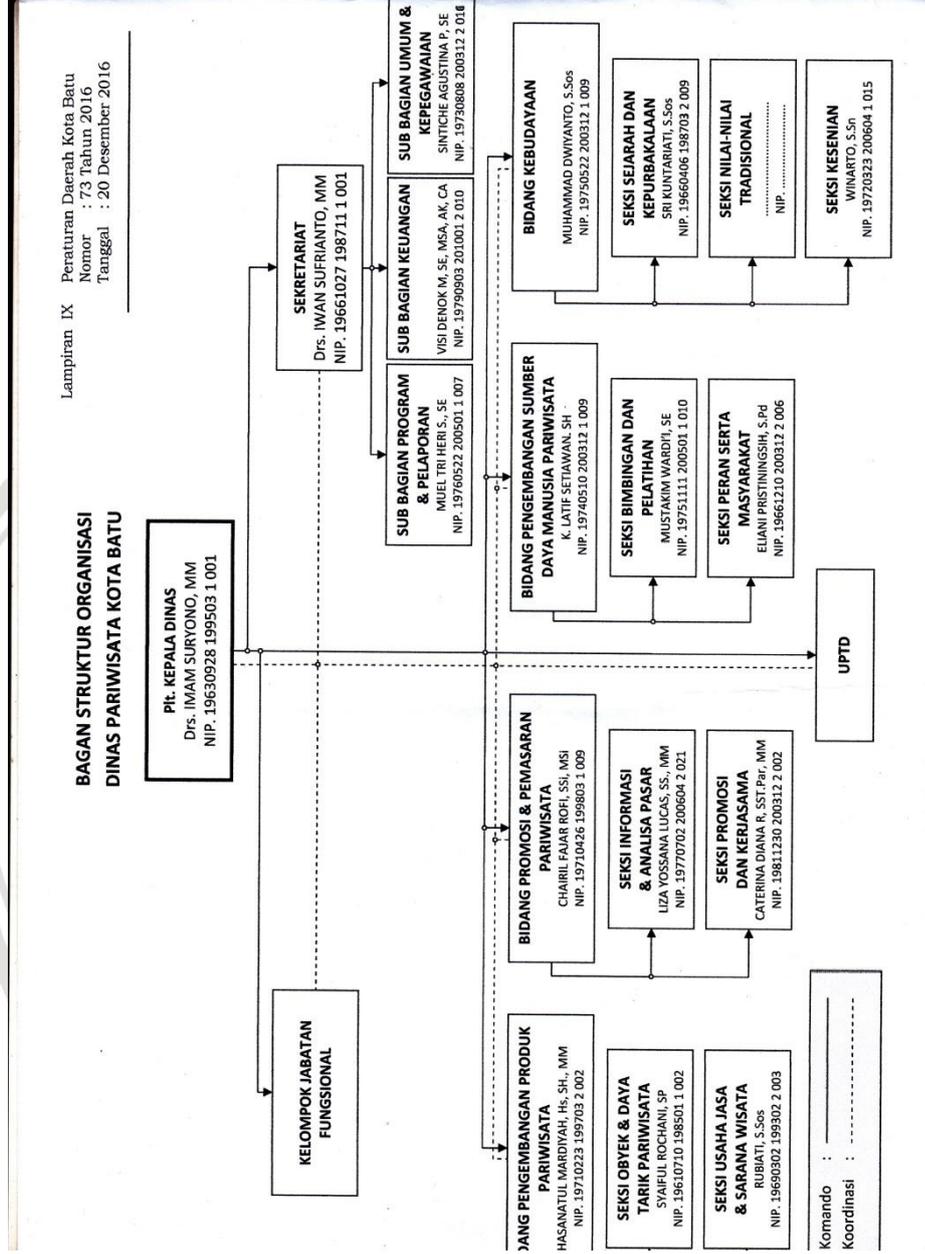
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU**



**WALIKOTA BATU,**  
**TTD**  
**EDDY RUMPOKO**



Lampiran 5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu



**Lampiran 6. Wawancara dengan Ibu Hasanatul Mardiyah, SH, MM. Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Batu**



**Lampiran 7. Wawancara dengan Ibu Eliani Pristiningsih, S.Pd. Seksi Peran Serta Masyarakat, Dinas Pariwisata Kota Batu**



**Lampiran 8. Wawancara dengan Bapak Mulyono Asih, Kepala Seksi Pelayanan Desa Junrejo Kota Batu**



**Lampiran 9. Kantor Pelayanan dan Kepala Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu**



**Lampiran 10. Wawancara dengan Bapak Tohu, Ketua UMKM Desa Junrejo dan Pemilik Pabrik Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”**



**Lampiran 11. Pabrik Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”**



Lampiran 12. Struktur Organisasi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”



Lampiran 13. Kegiatan Produksi Kerajinan Kayu “Tohu Srijaya”



**Lampiran 14. Kegiatan Produksi Tempat Tisu Olahan Kayu**



**Lampiran 15. Kegiatan Produksi Cobek dan Ulekan Olahan Batu Alam**



**Lampiran 16. Produksi Cobek dan Ulekan**



**Lampiran 17. Hasil Produksi Kerajinan Kayu**



**Lampiran 18. Hasil Produksi Kerajinan Cobek dan Ulekan**



**Lampiran 19. Hasil Produksi Kerajinan Anyaman dan Lampion**

